

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 20
TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN PENYALURAN
KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU
BINGIN TELUK**



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ROBBY FEBRIANTO

NIM. 500632666

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LAW NO.20 OF 2008 CONCERNING CREDIT DISTRIBUTION POLICY MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN BANK BRANCH SUMSEL BABEL BINGIN TELUK

ROBBY FEBRIANTO
Universitas Terbuka
robby_febrianto95@yahoo.com

This study, entitled Implementation of Law No. 20 of 2008 on Credit Distribution Policy for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) In Sumsel Babel Bank Branch Bingin Teluk aims to determine the factors that inhibit, the solutions provided by Bank Sumsel Babel and how the implementation of Law No. 20 Year 2008 About the Distribution of Credit Policy for Micro, Small and Medium Enterprises at Bank Sumsel Babel Branch Bingin Teluk.

Techniques and tools of collecting data through interviews, documentation and observation are classified into qualitative data that will be poured in the form of depiction. Data analysis technique used to answer the problem formulation in the study using the following steps: data reduction (data reduction), a data display (presentation of data) and conclusion drawing / verification.

The conclusion of research on policy and rule of Law Number 20 Year 2008 regarding the distribution of micro, small and medium enterprises that have been implemented well in one of the bank owned by the government, in this case the Bank Sumsel Babel Branch Bingin Teluk. But in practice there are still shortcomings that could hinder SME lending, such as from banks, is still a lack of human resources (HR) and facilities infrastructure is not maximized. Then from the public and customers, there is a problem in terms of administration, either in the completeness of the file or the legality of the guarantee.

Keyword : *Implementation, Policy, Lending Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs)*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU BINGIN TELUK

ROBBY FEBRIANTO
Universitas Terbuka
robby_febrianto95@yahoo.com

Penelitian ini berjudul Implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat, solusi yang diberikan oleh Bank Sumsel Babel dan bagaimana implementasi UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk.

Teknik dan alat pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi diklasifikasikan menjadi data kualitatif yang akan dituangkan dalam bentuk penggambaran. Teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing / verification*.

Kesimpulan dalam penelitian mengenai kebijakan dan aturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang sudah diimplementasikan dengan baik pada salah satu Bank milik pemerintah, dalam hal ini Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang dapat menghambat penyaluran kredit UMKM, seperti dari pihak perbankan, masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas sarana dan prasarana yang belum maksimal. Kemudian dari masyarakat dan nasabah, terdapat masalah dalam hal administrasi, baik dalam kelengkapan berkas maupun legalitas jaminan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI: ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan(plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Lubuklinggau, Juli 2016

Yang menyatakan



(Robby Febrianto)

NIM 500632666

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2008
TENTANG KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SUMSEL
BABEL CABANG PEMBANTU BINGIN TELUK

Penyusun TAPM : Robby Febrianto
NIM : 500632666
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Minggu, 24 Juli 2016

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



Dr. Yuni Tri Hewindati
NIP. 19590617 198609 2 001

Mengetahui,

Lubuklinggau, Desember 2016

Ketua Bidang ISIP
Program Magister Administasi Publik,

Direktur Program
Pascasarjana,



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI: ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Robby Febrianto
 NIM : 500632666
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul TAPM : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU BINGIN TELUK

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Minggu, 24 Juli 2016

Waktu : 09.00 – 09.55

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Ir. Adi Winata, M.Si

Penguji Ahli

Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc., Sc

Pembimbing I

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

Pembimbing II

Dr. Yuni Tri Hewindati





KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta
3. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan teoritis selama penulisan TAPM ini.
4. Ibu Dr. Yuni Tri Hewindati, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan teknis penulisan TAPM yang benar.
5. Bapak Tutor perkuliahan (Prof. Dr. Ki Agus Sobri, M.Si, Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si, dan Dr. Raniasa Putra, M.Si)
6. Segenap jajaran Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau dan Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk yang telah banyak membantu dalam menyediakan data yang diperlukan penulis dalam penyelesaian Laporan Akhir , terutama untuk Bapak Bahrin Ahmad dan M. Haedar yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan pengamatan di Bank Sumsel Babel

Cabang Bingin Teluk sekaligus memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari data yang penulis perlukan dalam penyelesaian TAPM ini

7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i anggota kelas Angkatan III Universitas Terbuka Kota Lubuklinggau khususnya (Shella, Ayu, Heru, dan Okta) yang telah belajar dan berbagi bersama kurang lebih selama 2 tahun ini dan kekompakan serta kebersamaan dalam melaksanakan ujian
8. Rekan-rekan satu bimbingan penulis (Heru, kak Insan, Yuk Vivin, dan Yuk Zarifha) yang selalu berusaha dengan meneteskan keringat dan penuh perjuangan bersama-sama dalam melaksanakan bimbingan dan mendapatkan tandatangan dosen pembimbing dan penguji
9. Terimakasih buat ayahanda dan ibunda tercinta, serta saudara – saudaraku yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan untuk menyelesaikan TAPM ini.
10. Terimakasih kepada seseorang “Shella Elvina“ yang telah menemani saya, mendukung, serta memberikan saya motivasi agar dapat menyelesaikan TAPM ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan TAPM ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Lubuklinggau, Juni 2016
Penulis,

Robby Febrianto
NIM. 500632666

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Teori	7
1. Implementasi	7
2. Kebijakan	8
3. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	11
4. Implementasi Kebijakan Publik	16
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pemikiran	29

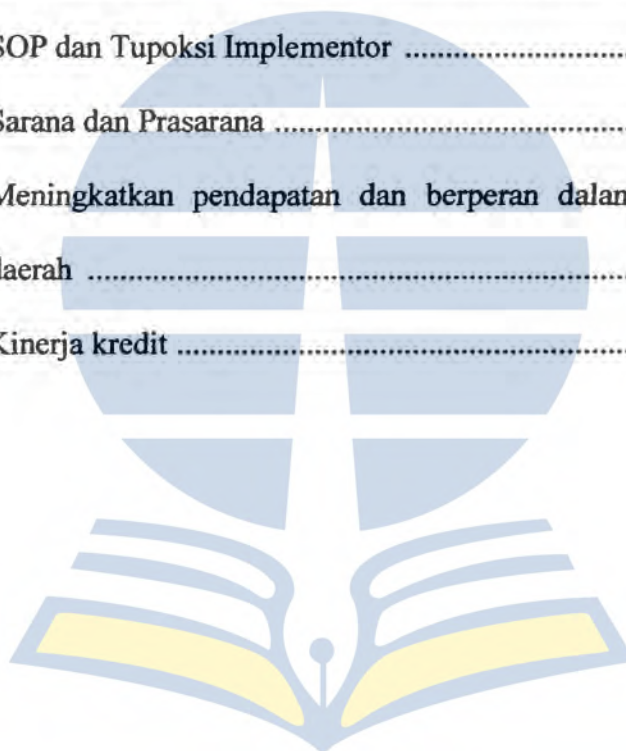
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Desain Penelitian	32
B. Informan Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Objek Penelitian	38
1. Gambaran Umum	38
2. Bank Sumsel Babel	42
3. Struktur Organisasi Bank SumselBabel cabang Lubuklinggau dan Pembagian Tugas	54
4. Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk	61
B. Implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk	61
1. Pengertian UMKM	61
2. Asas, tujuan, prinsip UMKM	63
3. Penumbuhan iklim usaha UMKM	64
4. Pengembangan usaha UMKM	64
5. Pembiayaan dan penjaminan UMKM	65
6. Kemitraan UMKM	65

7. Berdasarkan kegunaannya, kredit UMKM dibedakan menjadi 2 jenis	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kepatuhan Implementor (analisis kredit)	75
Tabel 4.2	Kepatuhan Implementor (Pimpinan)	76
Tabel 4.3	Kepatuhan nasabah	78
Tabel 4.4	Jumlah Pengajuan Kredit Periode Januari 2014 – April 2016	79
Tabel 4.5	Informasi Implementor	83
Tabel 4.6	Informasi nasabah	85
Tabel 4.7	SOP dan Tupoksi Implementor	87
Tabel 4.8	Sarana dan Prasarana	90
Tabel 4.9	Meningkatkan pendapatan dan berperan dalam pembangunan daerah	92
Tabel 4.10	Kinerja kredit	93



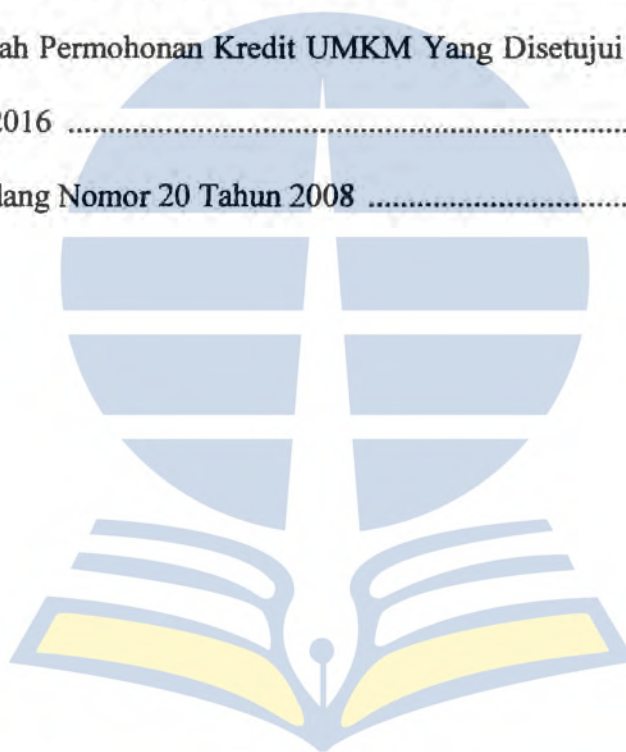
DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Berpiir	31
Bagan 4.1	Peta Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan	40
Bagan 4.2	Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel	45
Bagan 4.3	Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau ..	54
Bagan 4.4	Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk	61



DAFTAR LAMPIRAN

Biodata Peneliti	103
Instrumen Penelitian	105
Pedoman Wawancara	106
Foto Penelitian	109
Surat Permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian	110
Surat Pemberian Izin Pengumpulan Data Penelitian	111
Jumlah Nasabah Permohonan Kredit UMKM Yang Disetujui Periode Januari 2014 – April 2016	112
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Dunia yang semakin berkembang maju ini banyak negara melakukan berbagai terobosan yang bertujuan untuk membangun negaranya supaya tidak mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi dengan mengelola setiap bidang agar dapat bekerja dengan maksimal. Keadaan negara terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang ada di negara itu sendiri. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan baik, biasanya negara melakukan strategi baik dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian kerja sama dengan berbagai negara pada setiap bidang dapat mendorong kegiatan ekonomi pada suatu negara sehingga dapat memberikan *output* dengan terbukanya lapangan kerja.

Administrasi publik merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Administrasi publik merupakan produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi atau serupa dengan bisnis, tetapi khusus menghasilkan barang dan pelayanan publik. Di Indonesia produksi barang dan jasa dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan. Dalam hal ini lembaga keuangan yang dimaksud adalah bank. Di Indonesia bank memiliki dua jenis, yaitu bank

pemerintah dan bank swasta. Hadimnya bank dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengelola keuangan. Bank melakukan banyak kegiatan seperti menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), menyalurkan ke masyarakat (*lending*), dan memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*). Dalam pengembangannya bank dapat membantu pemerintah untuk melahirkan para pengusaha baru yang bertujuan untuk ikut serta menggerakkan roda ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Disini peran dari bank adalah menyalurkan kredit, seperti menyalurkan pinjaman untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kebijakan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang bertujuan:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2015 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Salah satu bank yang mendukung program pemerintah dalam menyalurkan kredit UMKM adalah Bank Sumsel Babel. Bank Sumsel Babel merupakan bank milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Pelaksanaan program kredit UMKM ini dilakukan oleh seluruh jaringan cabang dan cabang pembantu Bank Sumsel Babel, salah satunya Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk Kabupaten Muratara. Berdasarkan hasil observasi awal bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya penyaluran kredit UMKM di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk, yaitu:

Pertama, masih adanya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya administrasi, seperti masih ditemukannya masyarakat yang belum memenuhi kelengkapan dokumen yang merupakan syarat awal dalam pengajuan kredit .

Kedua, menurut Muhammad Haidar (Analisis kredit Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk) masih adanya jaminan yang belum bersertifikat sehingga legalitasnya kurang memadai, jaminan merupakan syarat pendukung dalam pengajuan kredit UMKM. Proses pengurusan sertifikat juga membutuhkan waktu sehingga menyebabkan proses penyaluran kredit membutuhkan waktu yang cukup lama.

Ketiga, Menurut Ariyan Tenovan (Penyelia Pelayanan Nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk) kondisi geografis kabupaten Muratara yang cukup luas sedangkan perbankkan sedikit, menyebabkan jarak antar daerah wilayah atau kecamatan cukup jauh sehingga proses penyaluran kredit seperti analisis dan survei lapangan sedikit terganggu.

Keempat, kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini karyawan Bank Sumsel Babel cabang Pembantu Bingin Teluk yang menyebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai layanan perbankan, khususnya penyaluran kredit.

Kemudian kelima, infrastruktur yang kurang mendukung, seperti akses jalan yang belum memadai, karena masih banyak jalan yang belum di aspal dan masih berlumpur di daerah bingin teluk kecamatan rawas ilir dan sistem teknologi dan informasi yang belum optimal, seperti gangguan jaringan sinyal dalam operasional perbankan.

Dengan belum maksimalnya penyaluran kredit UMKM di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk. Untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada maka peneliti mengambil judul: "**Implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk** "

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk?
3. Bagaimana solusi yang diberikan oleh Bank Sumsel Babel dalam implementasi UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, dan khususnya untuk menjawab penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk?
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk?

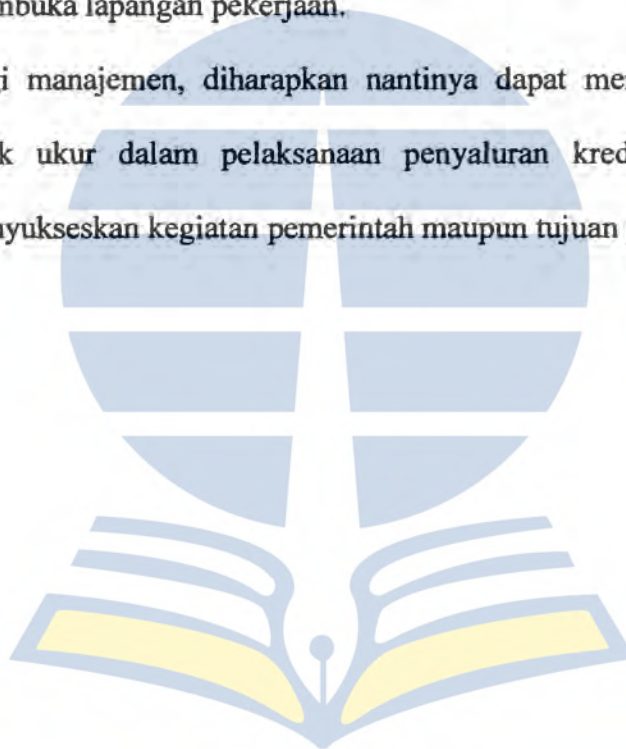
D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian Implementasi dalam penyaluran kredit UMKM pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan menjadi perhatian khusus dalam menangani masalah administrasi, sarana dan prasarana serta infrastruktur, mulai dari pengamatan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengerti betapa pentingnya sistem administrasi dalam status dan kepemilikan, dan turut serta dalam membuka lapangan pekerjaan.
- c. Bagi manajemen, diharapkan nantinya dapat menjadi perhatian dan tolak ukur dalam pelaksanaan penyaluran kredit baik dalam hal menyukseskan kegiatan pemerintah maupun tujuan perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39). Pengertian implementasi yang dikemukakan tersebut, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Harsono (2002:67) mengatakan bahwa Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Yousa (2007: 75) mengatakan bahwa " implementasi dapat dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan yang mampu untuk membentuk hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan dengan tujuan".

Berdasarkan beberapa pendapat dan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi adalah proses penjabaran, pelaksanaan, atau penerapan suatu konsep, rencana, kebijakan, dan program yang

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan, yang dalam prosesnya berinteraksi dengan berbagai aspek baik kekuatan politik, ekonomi, maupun, sosial budaya, yang menimbulkan dampak baik yang diharapkan (*positive effects*) maupun yang tidak diharapkan (*negative effects*).

2. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan secara etimologi, ialah kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah dari kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*".

Menurut Friedrich (1969) dalam Agustino (2008:7) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Anderson (1984) dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan adalah Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kepada individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers. Untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya. Dalam literatur administrasi. (Subarsono, 2005:87).

Chandier & Piano (1988) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang srategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya, Kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masaiah-masalah publik. (Tangkilisan, 2003:1).

Thomas R. Dye mengatakan Kebijakan pemerintah itu adalah apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya. (Soenarko, 2003:41).

Robert Eyestone mengatakan kebijakan pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungannya. (Soenarko, 2003:42).

Wilson dalam Wahab (2012: 13), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: "Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pertanyaan-pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah / sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)".

Dunn dalam Pasolog (2008: 39), mempunyai asumsi lain mengenai kebijakan publik yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah:

"Suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain".

Oleh karena itu dalam terminolog ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan nyata yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-

undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Berdasarkan paparan definisi tentang kebijakan publik yang telah dikutip dari para pakar tersebut di atas, maka dapat disimpulkan kebijakan publik secara umum dapat dikatakan sebagai: kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik. Dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah produk yang berasal dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat, dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

3. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria asset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria aset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria aset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

UU No.9 tahun 1995 tentang mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp 200 juta dengan omzet per tahun maksimal Rp 1 miliar. Sementara itu berdasarkan Inpres No.10 tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp 200 juta hingga Rp 10 miliar.

Kementerian Koperasi dan UKM menggolongkan suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omset kurang dari Rp 1 milyar per tahun. Untuk usaha menengah batasannya adalah usaha yang memiliki omset antara Rp 1 sampai dengan Rp 50 milyar per tahun.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp 5 milyar. Sementara itu usaha kecil di bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp 200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp 1 milyar (sesuai UU no.9 tahun 1995).

Bank Indonesia menggolongkan usaha kecil dengan merujuk pada UU no 9/1995, sedangkan untuk usaha menengah BI menentukan sendiri kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp 200 juta s/d Rp 5 miliar) dan non manufaktur (Rp 200 – 60 juta).

a. Prosedur penyaluran kredit

Dalam pelaksanaan penyaluran kredit secara umum dan termasuk UMKM harus melalui beberapa tahapan prosedur, yaitu:

1) Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain:

- a) Latar belakang perusahaan
- b) Maksud dan tujuan
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu
- d) Cara pengembalian kredit
- e) Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- a) Akte notaris
- b) Tanda daftar perusahaan (TDP)
- c) Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
- d) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f) Foto copy sertifikat jaminan

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- a) *Current ratio*
- b) *Inventory turn over*
- c) *Sales to receivable ratio*
- d) *Profit margin ratio*
- e) *Return on net worth*
- f) *Working capital*

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas

waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3) Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

4) *On the Spot* (Kunjungan Lapangan)

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6) Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup:

- a) Jumlah uang yang diterima
- b) Jangka waktu
- c) Biaya-biaya yang harus dibayar

7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lain

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8) Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran/penarikan

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- a) Sekaligus atau
- b) Secara bertahap

4. Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang atau keputusan-keputusan eksekutif. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuannya, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan mengandung makna pemahaman terhadap kejadian-kejadian setelah suatu program ditetapkan dan dilaksanakan. Oleh karena itu, fokus perhatian implementasi kebijakan menyangkut berbagai kejadian dan kegiatan yang muncul setelah disahkan pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Hal tersebut di atas juga dinyatakan oleh Sumaryadi (2005: 9) bahwa "Pemahaman proses implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang sesungguhnya terjadi setelah proses penetapan kebijakan dan sesudah kebijakan dikerjakan untuk selanjutnya melihat dampak yang terjadi".

Menurut Grindle dalam Wahab (2008: 188) menyatakan bahwa: "Implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dan / biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Inilah syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun".

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2012: 135) menjelaskan makna implementasi kebijakan adalah: "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian"

Sangatlah relevan apabila dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dituntut adanya peranan dari administration publik yang baik. Selain itu, dituntut memiliki kemampuan dalam menterjemahkan kebijakan pada berbagai tindakan yang konkrit sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan suatu kebijakan. Rambu-rambu pelaksanaan kebijakan mengidentifikasi betapa pentingnya suatu rumusan kebijakan publik agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan publik membicarakan tiga hal pokok, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan untuk pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Adanya hasil kegiatan.

4.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Banyak teori implementasi yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Hogwood dan Gunn (1978;1986), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementations*) maka diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan / Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius
- b. Tersedianya waktu dan sumber daya yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas, bersifat langsung dan hanya sedikit atau dapat diminimalkan
- f. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

- g. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- h. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan pihak lain yang sempurna.

Menurut Hogwood & Gunn untuk mencapai implementasi yang sempurna adalah mungkin manakala dapat mengontrol seluruh sistem administrasi sehingga kondisi-kondisi sebagaimana yang mereka sebutkan diatas dapat dipenuhi, meski juga menyadari bahwa kondisi demikian nyaris mustahil terjadi di dunia nyata. Namun mereka memandang bahwa proposisi-proposisi tersebut adalah syarat normatif yang harus diupayakan agar implementasi berjalan menuju sempurna. Sayangnya di dunia nyata selain kondisi demikian sangat sulit bahkan mustahil dipenuhi sepenuhnya.

Menurut Grindle (1980:5), konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi adalah sebagai berikut:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga dapat menikmati outputnya.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai “siapa mendapatkan apa” (misalnya penggusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri pengusaha atau lembaga yang menjadi implementor program tersebut, baik mengenai keberpihakan pengusaha / lembaga pelaksana maupun mengenai gaya kepemimpinannya (otoriter / demokratis)

c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Implementor harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan kelompok sasarannya agar program yang diimplementasikan berhasil dan mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran .

Model yang dikembangkan oleh Grindle ini tampak lebih komprehensif dari model sebelumnya, bukan hanya memperhitungkan faktor-faktor yang ada di dalam kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi dan dinamika hubungan (konflik, dukungan, dll) dengan penerima implementasi, tapi juga mempertimbangkan konteks lingkungan dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut dilaksanakan, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.

Sedangkan menurut Edwards III dalam Widodo (2011: 96-110) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward

menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok, yaitu:

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- b. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi (kecenderungan) dan struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan dari pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Dalam implementasi, komunikasi setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan juga harus tepat, akurat dan konsisten, sehingga para pembuat kebijakan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan ditetapkan dalam masyarakat.

b. Faktor Sumberdaya (*Resources*)

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-

ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Ada empat indikator dalam faktor sumber daya ini, yaitu: staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Faktor Disposisi / Sikap (*Disposition*)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Variabel disposisi antara lain pengangkatan birokrat dan insentif.

d. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak berjalan kondusif pada kebijakan, maka sumberdaya menjadi tidak efektif dan akan menghambat jalannya kebijakan.

Terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

Alfatih (2010:15) menyatakan implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Menurut Ripley dan Franklin, Dalam buku yang berjudul *Policy Implementasi and Bureacracy*, Randall B. Repley and Grace A. Franklin (1986: 232-33) (dalam Alfatih, 2010:51-52), menulis tentang *three conceptions relating to successful implementation*. Mereka menyatakan ada *analist and actors* yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang berhasil dinilai, pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (*degree of compliance*). Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur adanya kelancaran rutinitas fungsi. Oleh karena Ripley dan Franklin menganggap kedua parameter tersebut "*is too narrow and have limites political interest*", maka mereka mengajukan *perspective* yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan. Mereka mengutarakan ini dengan mengatakan "*we advance a third persepective, which is that successful implementation leads to desired... impact from whatever program is being analyzed.*"

Jadi ada 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan impelementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi program kemitraan. Hal ini

dikarenakan ketiga persepektif tersebut tidak kontradiksi satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga persepektif tersebut lebih *holistic*, oleh karenanya cocok dengan penelitian ini. Ketiga *measurement* tersebut adalah:

1) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program, (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:69)

2) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah- masalah yang dihadapi; (Haedar : 2010).

3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. (dalam Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik: Volume 1* (Nomor 1) tahun 2010).

Pendapat Ripley dan Franklin diatas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana

tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga , dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari kebijakan.

4.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik yang Digunakan

Dari uraian beberapa teori implementasi di atas, tidak ada teori yang sangat cocok untuk diterapkan dalam mengimplementasikan kebijakan penyaluran kredit UMKM. Setelah mengelompokkan permasalahan yang ada yaitu dari segi administrasi, dalam hal ini belum lengkapnya dokumen yang dibutuhkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk kepada setiap nasabah potensial dan produktif.

- a. Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya administrasi, seperti masih ditemukannya masyarakat yang belum memenuhi kelengkapan dokumen yang merupakan syarat awal dalam pengajuan kredit.
- b. Masih adanya jaminan yang belum bersertifikat sehingga legalitasnya kurang memadai, jaminan merupakan syarat pendukung dalam pengajuan kredit UMKM. Proses pengurusan sertifikat juga membutuhkan waktu sehingga menyebabkan proses penyaluran kredit membutuhkan waktu yang cukup lama.
- c. Kondisi geografis kabupaten Muratara yang cukup luas sedangkan perbankannya sedikit, menyebabkan jarak antar daerah wilayah atau kecamatan cukup jauh sehingga proses penyaluran kredit seperti analisa dan survei lapangan sedikit terganggu.

- d. Kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini karyawan Bank Sumsel Babel cabang Pembantu Bingin Teluk yang menyebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai layanan perbankan, khususnya penyaluran kredit.
- e. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses jalan yang belum memadai, karena masih banyak jalan yang belum di aspal dan masih berlumpur di daerah bingin teluk kecamatan rawas ilir dan sistem teknologi dan informasi yang kurang memadai, seperti gangguan jaringan sinyal dalam operasional perbankan.

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi penyaluran kredit UMKM. Hal ini dikarenakan ketiga perspektif tersebut saling berhubungan dan melengkapi, sehingga cocok dengan penelitian ini. Maka teori Ripley And Franklin dirasa cocok dan pantas oleh peneliti untuk dijadikan pedoman dalam penelitian untuk melihat implementasi kebijakan penyaluran kredit UMKM.

Seperti yang dijelaskan di atas, penelitian ini mengungkapkan teori menurut Ripley and Franklin, menurut mereka dalam Alfatih (2010: 51-52) ada tiga cara yang dominan bagi tercapainya tujuan dari suatu implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Tingkat Kepatuhan

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan

keberhasilan proses implementasi yang ditentukan oleh kemampuan implementator. Apabila dalam pelaksanaannya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 dijalankan dan dipatuhi sesuai dengan yang diperintahkan, maka akan berhasil dalam penerapannya.

b. Rutinitas Fungsi

Rutinitas berasal dari kata rutin yang dalam kamus besar bahasa indonesia, rutin memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan - tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan yang dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan sistem operasi dan prosedur yang telah dibuat dan disepakati, serta juga harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.

c. Kinerja dan Dampak

Dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Dimana suatu program bisa saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal dilihat dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Saat Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 dijalankan sesuai dengan prosedur akan berdampak dengan berhasilnya penyaluran kredit, dan tidak adanya

dampak negatif yang ditimbulkan, maka implementasi kebijakan tersebut terlaksana dengan baik dan berhasil.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Peranan Pemerintah dalam Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah dilakukan oleh A. Muditomo (2013). Dalam penelitian itu, peneliti melihat Pemberdayaan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Namun demikian disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kondisi lapangan, pemasaran dan keuangan.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk Kabupaten Muratara merupakan kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyaluran UMKM dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2015 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Implementasi. Kebijakan Penyaluran Kredit UMKM menggunakan model implementasi kebijakan yang

diungkapkan oleh Ripley and Franklin, yaitu kepatuhan, rutinitas, dampak. Adapun dalam melakukan penilaiannya dengan mengacu pada tiga faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, antara lain:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Perspektif pertama (compliance perspective) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program. (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:69)

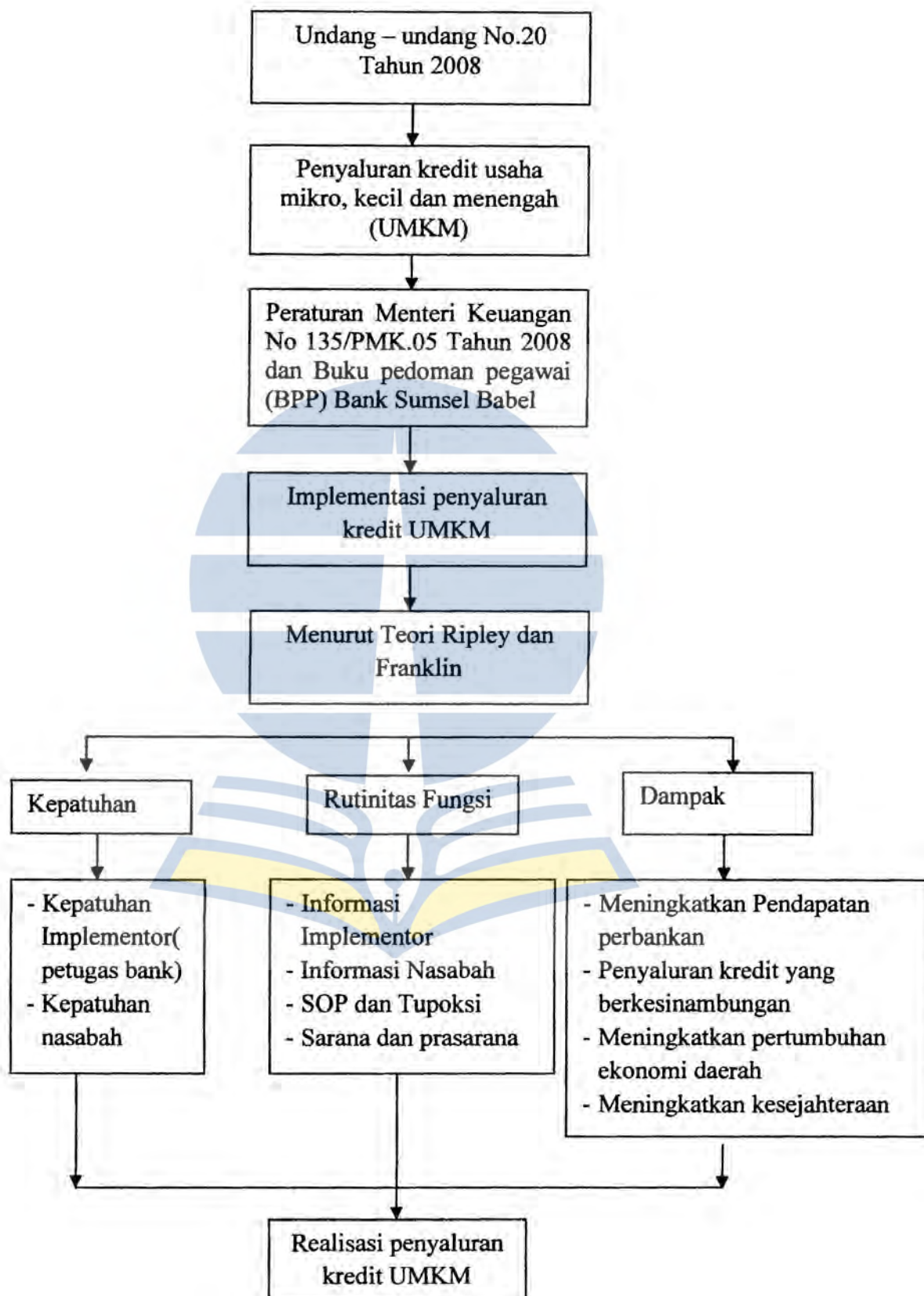
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah- masalah yang dihadapi; (dalam Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik*: Volume 1 (Nomor 1) tahun 2010).

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. (dalam Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik*: Volume 1 (Nomor 1) tahun 2010).

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut ini:



Bagan 2.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Nazir (2005: 84), bahwa “Dalam pengertian yang sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Dalam pengertian luas, desain penelitian mencakup proses-proses berikut:

1. Identifikasi dan pemilihan masalah penelitian
2. Pemilihan kerangka konseptual untuk masalah penelitian serta hubungan-hubungan dengan penelitian sebelumnya
3. Memfokuskan masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari tujuan, luas jangkauan (scope), dan hipotesis untuk diuji
4. Membangun penyelidikan atas percobaan
5. Memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel
6. Memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan
7. Menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang menggambarkan secara keseluruhan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh ditempat penelitian untuk mengetahui adanya hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Nazir (2003: 54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual,

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif yaitu pendekatan yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk diteliti yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan uraian diatas kesimpulan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan induktif adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempelajari, mengamati, menyelidiki, dan menggambarkan suatu hal, gejala, atau permasalahan tertentu yang bersifat khusus dengan pengumpulan data dan mencari data di lapangan sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan.

B. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu informan internal dan informan eksternal. Informan internal adalah informan yang berasal dalam lingkungan Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau dan Cabang Pembantu Bingin Teluk yaitu terdiri dari pimpinan cabang, analis kredit, adm kredit, penyelia, pelayanan dan umum cabang Lubuklinggau dan cabang pembantu Bingin Teluk.

Sedangkan informan eksternal yang berasal diluar lingkungan Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau dan Cabang Pembantu Bingin Teluk yaitu nasabah dan calon nasabah.

C. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2000: 116) bahwa: "Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan". Selanjutnya menurut Nawawi (2001: 14) subjek penelitian adalah "Keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan dan tumbuh-tumbuhan". Penentuan subjek sebagai sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu penentuan subjek penelitian sebagai sumber data dengan pertimbangan atau tujuannya sesuai dengan fokus penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Sanafiah Faisal dalam Sugiono (2011:304) mengatakan bahwa "sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu mulai proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimbung atau terlibat pada kegiatan yang telah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong "cukup asing" dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber

Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan instrumen:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, dan berhadapan langsung dengan informan kunci yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti. Menurut Nazir (2011:193) wawancara adalah “proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)”.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung pada suatu objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data-data dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori dan konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, masalah, koran, ataupun karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu teknik atau cara serta langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Arikunto (2006: 273) mengemukakan bahwa “Analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal”. Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgan dalam Sugiono (2005: 88) menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada oranglain”.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi diklasifikasikan menjadi data kualitatif yang akan dituangkan dalam bentuk penggambaran.

Teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Sugiono (2012: 247) menyatakan bahwa “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Selatan dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429), yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil pemekaran tersebut mencakup 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo, Karang Jaya, dan Kecamatan Ulu Rawas. Secara keseluruhan wilayahnya terbentang seluas 6.008,55 km², dengan jumlah penduduk mencapai 195.689 jiwa (data tahun 2012), serta jumlah desa/kelurahan sebanyak 89 desa/kelurahan.

Kabupaten Musi Rawas Utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun (Jambi) di sisi utara, Kabupaten Musi Banyuasin di sisi timur, Kabupaten Musi Rawas di sisi selatan, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Lebong (Bengkulu), yang beribukota di Kelurahan Muara Rupit yang terletak di Kecamatan Rupit.

a. Pertanian

Sebagai penyumbang terbesar utama dalam perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara, sektor pertanian tanaman pangan merupakan sektor unggulan pertama kabupaten.

b. Perkebunan

Karet merupakan komoditas paling besar dari sektor perkebunan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki persentase penggunaan lahan yang hanya sekitar 2,2% dari total lahan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Akan tetapi, apabila dilihat dari jumlah produksinya, pada tahun 2012 kelapa sawit rakyat di kabupaten ini sudah mampu menempati peringkat 5 dalam lingkup kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

c. Pertambangan

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki berbagai potensi di bidang pertambangan dan penggalan baik pada sektor migas maupun non migas. Akan tetapi, apabila dilihat pada perkembangan nilai PDRB nya selama ini diketahui bahwa minyak dan gas bumi merupakan komoditas utama sektor ini. Saat ini potensi bahan tambang yang ada di Musi Rawas Utara terdiri dari batubara, emas, perak, tembaga, besi, timah hitam dan seng.

d. Peternakan

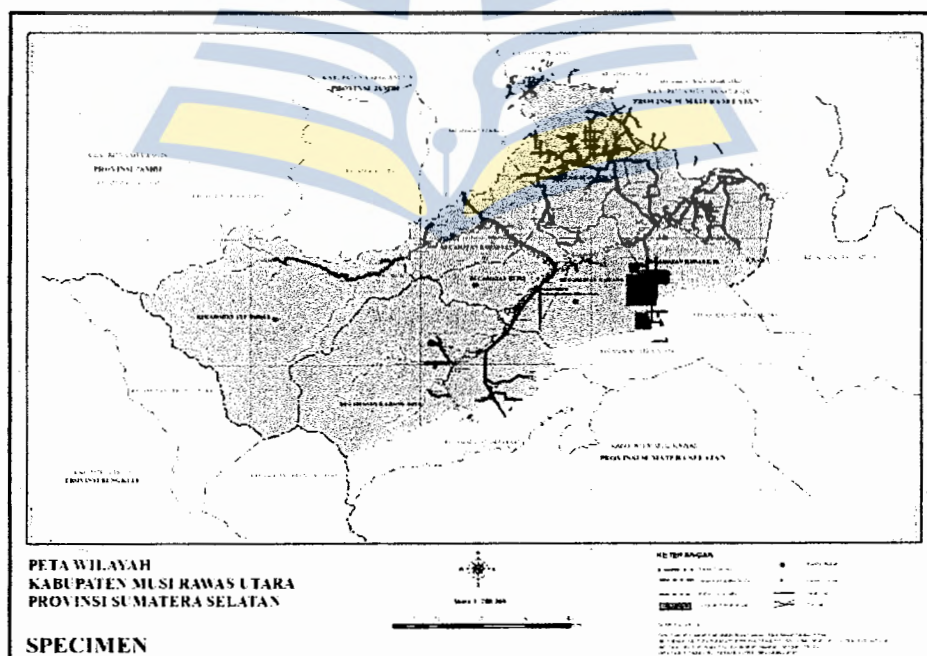
Berdasarkan kondisi klimatologi untuk pertumbuhan rumput pakan ternak dan hamparan lahan yang dimungkinkan untuk pengembangan ternak skala besar, pemerintah daerah telah memprioritaskan pengembangan Kecamatan Ulu Rawas sebagai lokasi pengembangan sektor peternakan khususnya kambing, domba.

e. Perikanan

Terdapat dua jenis sumber produk ikan di Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap sepenuhnya memanfaatkan sumber daya alam yang dihasilkan dari sungai, danau dan waduk yang ada di kabupaten ini, sedangkan untuk perikanan budidaya banyak dilakukan di kolam, keramba maupun jaring apung.

f. Pariwisata

Untuk sektor pariwisata, Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai berbagai obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan. Namun dengan berbagai pertimbangan terutama dana, terdapat 4 obyek wisata yang diunggulkan pengembangannya oleh pemerintah daerah adalah Danau Raya/Rayo-Kecamatan Rupit, Gua Napalicin di Kecamatan Ulu Rawas, Curup Sembilan dan Bendungan Ulu di Kecamatan Karang Jaya.



Bagan 4.1. Peta Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

g. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rawas Ilir yang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kecamatan Rawas Ilir berjarak kurang lebih 45 km dari Rupit yang merupakan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Utara. Kecamatan Rawas Ilir dibagi menjadi 1 kelurahan dan 12 desa, antara lain:

Kelurahan Bingin Teluk dan terdiri dari 12 Desa, yaitu

- 1) Air Bening
- 2) Batu Kucing
- 3) Belani
- 4) Beringin Makmur I
- 5) Beringin Makmur II
- 6) Beringin Sakti
- 7) Ketapat Bening
- 8) Mandi Angin
- 9) Mekar Sari
- 10) Pauh
- 11) Pauh I
- 12) Tanjung Raya

2. Bank Sumsel Babel

2.1 Sejarah Perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan pada tanggal 6 November 1957 dengan nama PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan:

- a. Keputusan Panglima Ketua Penguasa Perang Daerah Sriwijaya Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 dengan berlaku surut. mulai tanggal 6 Nopember 1957.
- b. Akta Notaris Tan Thong Khe Nomor 54 tanggal 29 September 1958 dengan izin Menteri Kehakiman No. J.A.5/44/16 tanggal 11 Mei 1959.
- c. Izin Usaha Bank dari Menteri Keuangan Nomor 47692/UM II tanggal 18 April 1959.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah, maka terhitung sejak tahun 1962, secara resmi seluruh kegiatan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan menjadi milik Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dengan status badan hukum perusahaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/DPRDGR Tingkat I Sumatera Selatan, Dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Central/Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/Kep/MUSB/G/63 Tanggal 27 Februari 1963.

Setelah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan dan sesuai dengan perda NO 6 tahun 2000 tanggal 19 mei 2000. Bank Sumsel mengubah bentuk

badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan persero terbatas dengan akta pendirian No 20 tanggal 25 November 2000 dan persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 3/2/KEP.DpG/2001 tanggal 24 september 2001.

Berdasarkan Pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan Nomor 2 Tanggal 03 November 2009 dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56914.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20 november 2009, maka Bank Sumsel berubah nama menjadi Bank Sumsel Babel.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

"Menjadi Bank sehat yang tumbuh secara berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan nasabah".

b. Misi

- 1) Mengutamakan dan membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah.
- 2) Menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah
- 3) Menjadi agen pembangunan yang dapat diandalkan.
- 4) Membantu dan mengembangkan pengusaha golongan ekonomi lemah.
- 5) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang lebih tanggap terhadap tuntutan pembangunan daerah dan tuntutan pasar.
- 6) Mengoptimalkan keunggulan bisnis retail banding.
- 7) Sebagai pemegang kas daerah.

2.3. Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel dan Pembagian Tugas

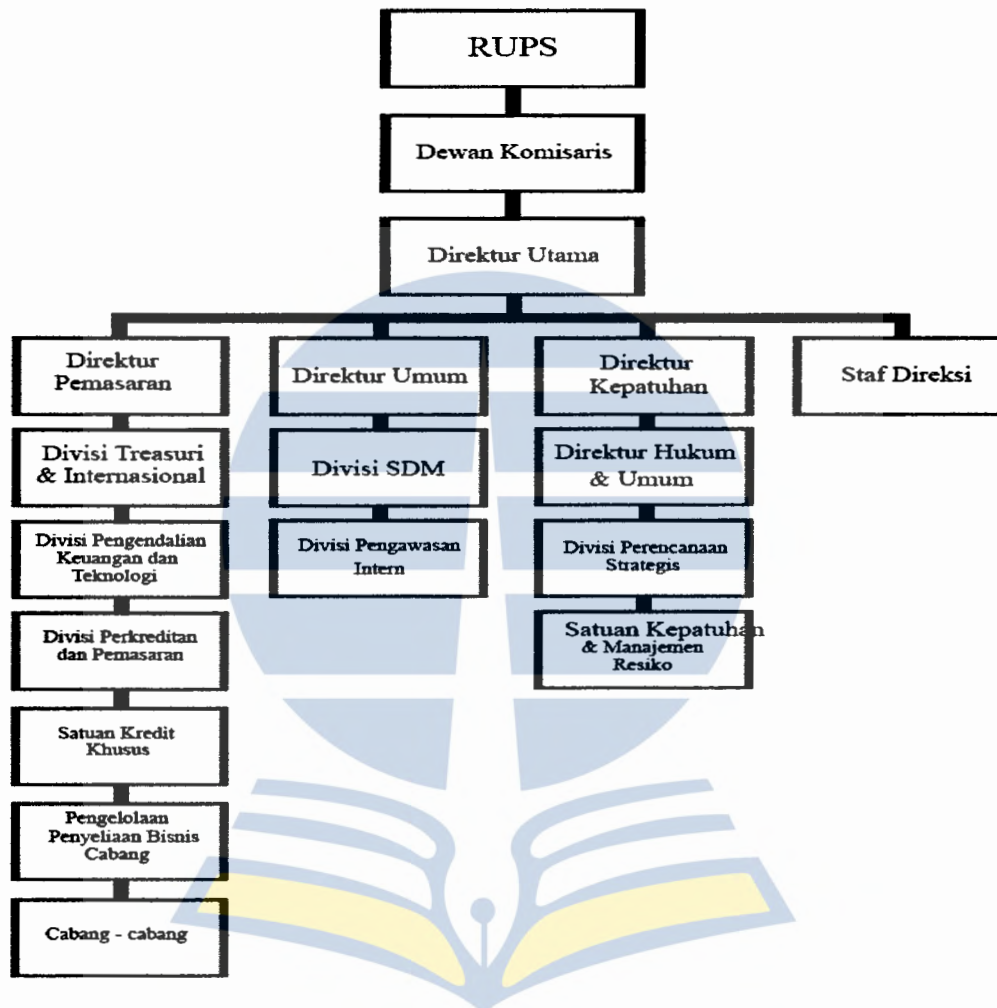
a. Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel

Organisasi yang terstruktur dengan baik berperan penting dalam kelancaran aktivitas suatu perusahaan. Selain itu struktur organisasi juga secara tidak langsung berperan membantu perusahaan didalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak kepada bawahannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan langkah awal yang harus disusun oleh seorang pimpinan dalam upaya mencapai tujuannya, dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang bekerja sama dan mempunyai tujuan yang telah di tetapkan serta terikat oleh peraturan.

Tujuan dan struktur organisasi adalah untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan dan pembagian tugas yang jelas serta pendayagunaan karyawan secara optimal disamping untuk pembinaan dan pengembangan karir karyawan secara menyeluruh, dan guna menghindarkan birokrasi yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas operasional rutin.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan diperlukan struktur organisasi yang mendeskripsikan secara jelas, tugas dan tanggung jawab dan setiap personilnya yang ikut ambil bagian didalam perusahaan tersebut. Adapun struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut:

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG**



Bagan 4. 2. Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel

Sumber : Bank Sumsel Babel

b. Pembagian Tugas

Dari gambaran struktur organisasi Bank Sumsel Babel, dapat dilihat bahwa struktur organisasi tersebut memiliki komposisi yang terdiri dari:

1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi.

Wewenang RUPS:

- a) Mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
- b) Mengambil keputusan mengenai penggunaan laba bersih termasuk penyisihan cadangan deviden.
- c) Mengangkat Direksi dan Komisaris berdasarkan rekomendasi remunerasi dan nominasi dengan memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia.
- d) Memberhentikan Direksi dan / atau Komisaris.
- e) Menilai kinerja komisaris dan direksi secara individual maupun kolektif melalui mekanisme RUPS tahunan.
- f) Menetapkan Remunerasi Komisaris dan Direksi.
- g) Menunjuk Auditor eksternal dan calon yang dianjurkan oleh Komisaris atau Komite Audit.
- h) Menandatangani kontrak manajemen dengan setiap calon anggota direksi yang akan menduduki jabatannya di perusahaan untuk memenuhi target-target yang ditetapkan oleh RUPS, peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan terbatas dan perbankan, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.

Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

- a) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi.
- b) Komisaris menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank Sumsel Babel.
- c) Komisaris melakukan pengawasan atau pengurusan Bank Sumsel Babel.
- d) Komisaris mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Sumsel Babel.
- e) Komisaris membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank Sumsel Babel.
- f) Komisaris menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Resiko.
- g) Komisaris menyetujui piagam audit Internal (*Internal Audit Charter*) dan menanggapi rencana audit internal.
- h) Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen resiko.

- i) Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan sistem pengendalian internal.
- j) Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan pengendalian internal perusahaan.
- k) Komisaris mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan komisaris.
- l) Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank Sumsel Babel.
- m) Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - (1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan
 - (2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Sumsel Babel.
- n) Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota komisaris, paling kurang mencantumkan
 - (1) Pengaturan etika kerja
 - (2) waktu kerja, dan
 - (3) Pengaturan rapat

- o) Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban.
- p) Anggaran komisaris dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar:

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank Sumsel Babel dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 2) Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS.

- 3) Direksi wajib menyusun rencana bisnis dan disetujui oleh komisaris, serta melaporkannya kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun takwin dimulai.
- 4) Direksi wajib mengkomunikasikan rencana bisnis, kepada:
 - a) Pemegang saham
 - b) Seluruh jenjang organisasi yang ada
- 5) Direksi mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan lancar dan sehat.
- 6) Direksi wajib mengelola Bank Sumsel Babel sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Direksi wajib melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh jajaran Bank Sumsel Babel.
- 8) Direksi wajib membentuk satuan kerja audit internal (SKAT), satuan kerja manajemen resiko dan komite resiko, serta satuan kerja kepatuhan.
- 9) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dan satuan kerja audit internal (SKAT) Bank Sumsel Babel.
- 10) Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

- 11) Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.
- 12) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada komisaris.
- 13) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota setiap direksi.
- 14) Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai manajemen risiko.
- 15) Direksi memiliki pedoman atas jenis keputusan yang bisa dilakukan secara individual dan kolegal.
- 16) Direksi harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dan berbagai *stakeholder* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Divisi Treasuri dan Internasional

Visi dan Misi Divisi Treasuri dan Internasional : "Mengelola dan mengembangkan kegiatan bisnis treasuri dan jasa luar negeri secara modern dan profesional sebagai salah satu kegiatan utama bisnis yang menguntungkan dalam rangka memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kinerja finansial Bank Sumsel Babel ".

e. Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi.

Visi dan Misi Pengendalian Keuangan dan Teknologi : "Mewujudkan sistem informasi akuntansi dan pengendalian keuangan yang mampu menjamin tercapainya keuangan Bank Sumsel Babel yang sehat dan

profitable, serta menyediakan sarana teknologi informasi yang modern, efektif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan bisnis".

f. Divisi Perkreditan dan Pemasaran

Visi dan Misi Divisi Perkreditan dan Pemasaran : "Meningkatkan kinerja pemasaran dana dan kredit menjadi lebih baik dengan kebijakan pengelolaan bisnis yang mengacu pada kredit *risk management* serta ditunjang oleh aktivitas pemasaran secara komprehensif".

g. Satuan Kredit Khusus

Visi dan Misi Satuan Kredit Khusus : "Mengelola kredit bermaslah dan hapus buku dalam rangka meningkatkan kualitas dan portofolio aset perkreditan Bank Sumsel Babel".

h. Pengelolaan Penyelia Bisnis Cabang

Visi dan Misi Pengelolaan Penyeliaan Bisnis Cabang : "Menunjang pengembangan bisnis Bank Sumsel Babel melalui pengawasan dan pembinaan dalam operasional bisnis dan sistem manajemen yang dilaksanakan cabang".

i. Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia

Visi dan Misi Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia : "Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi melalui pengelolaan SDM yang terintegrasi dan didukung oleh sistem informasi SDM yang akurat dan kebijakan SDM yang *up to date* dan transparan".

j. Divisi Pengawasan Internal

Visi dan Misi Pengawasan Internal : "Memastikan kegiatan operasional dan bisnis Bank Sumsel Babel telah berjalan dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku dalam rangka mewujudkan Bank Sumsel Babel yang sehat, berkembang dan *profitable*."

k. Satuan Manajemen Resiko

Visi dan Misi Satuan Manajemen Resiko : "Mengelola resiko pada seluruh kegiatan bisnis dan operaional Bank Sumsel Babel secara terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan ".

l. Divisi Hukum dan Kesekretariatan Umum

Visi dan Misi Hukum dan Kesekretariatan : "Menjaga dan melindungi kepentingan hukum perusahaan dengan mengupayakan optimalisasi pengawasan aspek hukum dan keteraturan administratif terhadap aktifitas internal dan eksternal perusahaan yang didukung dengan upaya penanganan perkara (Litigasi) yang siap pakai dan penataan arsip yang teratur serta menjaga kepentingan hukum perusahaan terlaksana dengan selaras ".

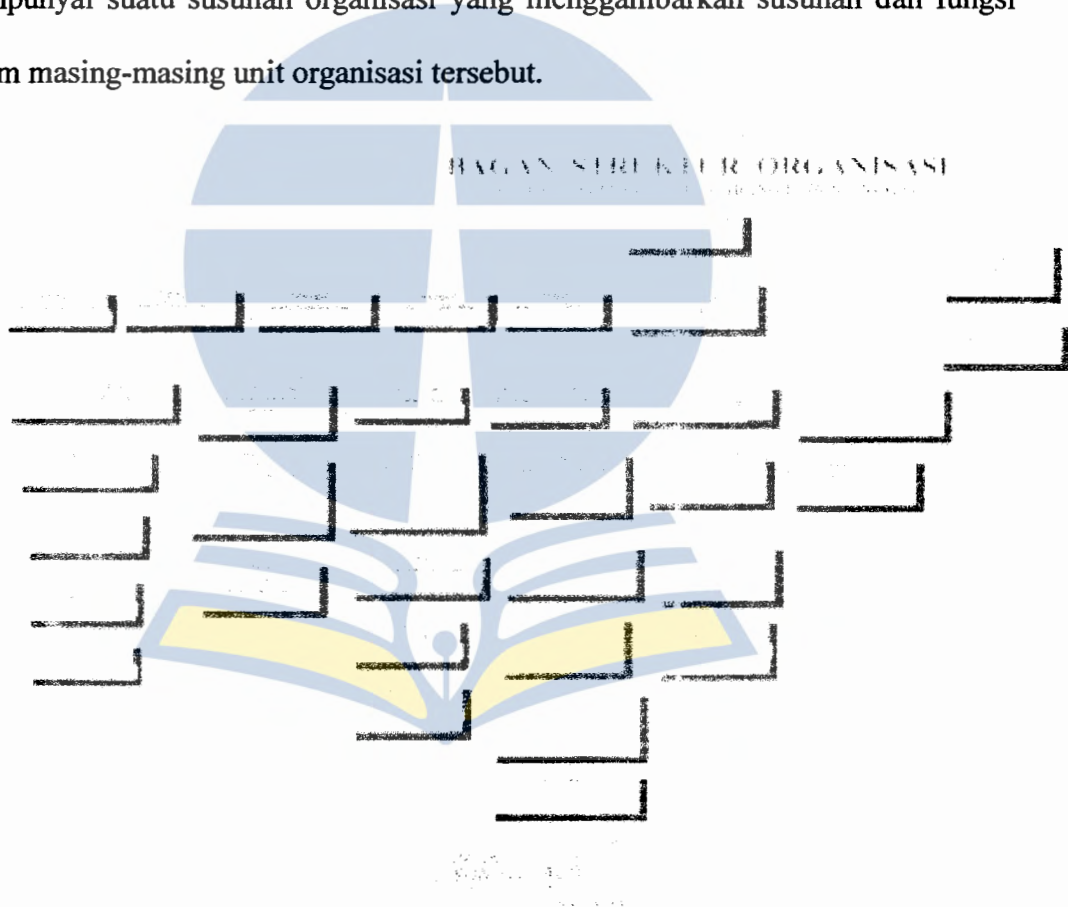
m. Divisi Perencanaan Strategis

Visi dan Misi Perencanaan Strategis : "Mengelola proses perencanaan strategis yang meliputi perencanaan sistem manajemen maupun perencanaan bisnis dan mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan Bank Sumsel Babel yang terarah dan konsisten ".

3. Struktur Organisasi Bank SumselBabel cabang Lubuklinggau dan Pembagian Tugas

3.1 Struktur Organisasi Bank SumselBabel cabang Lubuklinggau

Untuk mendukung kelancaran perusahaan ditingkat pusat diperlukan suatu struktur organisasi yang baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Sebagai perpanjangan perusahaan pusat suatu organisasi cabang umumnya juga mempunyai suatu susunan organisasi yang menggambarkan susunan dan fungsi dalam masing-masing unit organisasi tersebut.



Bagan 4. 3. Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau

3.2 Pembagian Tugas dan Wewenang

a. Pimpinan Cabang (*Assisten Vice President*)

- 1) Menetapkan rencana kerja dan anggaran kantor cabang, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai.
- 2) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung maupun tidak langsung kinerja uni-unit dibawahnya menurut bidang tugas masing-masing sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Ikut berpartisipasi dalam memasarkan produk dan jasa Bank Sumsel Babel cabang Lubuklinggau kepada nasabah atau calon nasabah yang potensial dalam rangka meningkatkan volume bisnis dan penguasaan pasar.

b. Wakil Pimpinan Cabang (*Manager*)

- 1) Memberikan dukungan kepada pemimpin cabang dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan aktivitas.
- 2) Memberikan informasi dan melayani transaksi produk pembiayaan, pendanaan dan jasa dengan prinsip dan mengelola pajak.
- 3) Melayani transaksi dan uang tunai dan memindahkan serta kegiatan eksternal.

c. Pimpinan Cabang Pembantu (*Manager*)

Sebagai perpanjangan tangan dari pimpinan cabang pada daerah kecamatan yang memiliki pasar potensial, dan ikut serta dalam memasarkan produk dan jasa Bank Sumsel Babel.

d. Pimpinan Kantor Kas (*Senior Ass. Manager*)

Membantu kantor cabang induk dalam memasarkan produk dan jasa Bank Sumsel Babel dan bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi kinerja pegawai kantor kas dalam hal ini:

- 1) Memberikan informasi mengenai produk dan jasa Bank Sumsel Babel cabang Lubuklinggau.
- 2) Melayani transaksi produk dan jasa yang dimiliki Bank Sumsel Babel.
- 3) Melakukan administrasi dan pembukuan dari dan ke rekening kantor cabang induk.

e. Penyelia Unit Pelayanan Nasabah (*Senior Ass. Manager*)

- 1) Memberikan informasi mengenai produk dan jasa yang tersedia.
- 2) Memberikan informasi mengenai syarat pembukaan dan penutupan rekening dan membantu nasabah dalam kelengkapan.
- 3) Melayani permohonan kartu anjungan tunai mandiri (ATM)

f. Penyelia Uang Tunai (*Senior Ass. Manager*)

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai dan pemindahan ataupun kliring.
- 2) Melayani kegiatan eksternal/*payment point*.

g. Penyelia Umum dan Akuntansi (*Senior Ass. Manager*)

- 1) Memeriksa kebenaran transaksi keuangan.
- 2) Memantau dan mengendalikan transaksi pembukuan rekening nasabah dan rekening keuangan kantor cabang.

- 3) Mengelola data informasi kondisi keuangan kantor cabang dan rekening nasabah.
- h. **Penyelia Kredit dan Pemasaran (*Senior Ass. Manager*)**
- 1) Meningkatkan kinerja kredit menjadi lebih baik dengan kebijakan pengelolaan bisnis yang mengacu pada *credit risk management*.
 - 2) Memberikan informasi mengenai produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa Bank Sumsel Babel.
 - 3) Memasarkan produk pembiayaan pendanaan dan jasa perbankan kepada nasabah atau calon nasabah.
 - 4) Mengelola permohonan pembiayaan dan memantau kolektibilitas nasabah.
- i. **Penyelia Unit Legal dan Admin Kredit (*Senior Ass. Manager*)**
- 1) Mengelola administrasi pembiayaan.
 - 2) Mengelola pembuatan perjanjian pembiayaan dan pengikatan barang jaminan.
- j. **Kontrol Internal**
- 1) Melaksanakan perbaikan atau penyempurnaan atas temuan audit internal dan eksternal oleh masing-masing unit.
 - 2) Mengawasi dan mengendalikan proses kegiatan harian dan manajemen.
 - 3) Mendistribusikan surat masuk yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan transaksi/kegiatan perbankan.

k. Asisten Pelayanan Nasabah (*Assisten*)

- 1) Memebrikan informasi mengenai produk dan jasa Bank Sumsel Babel.
- 2) Melayani permohonan pembukaan / perubahan / penutupan rekening tabungan giro dan deposito.
- 3) Melayani transaksi produk dan jasa Bank Sumsel Babel cabang Lubuklinggau.

l. Teller (*Assisten*)

- 1) Melayani transaksi tunai/ kas.
- 2) Melayani pemindahan kliring.
- 3) Melayani bagian eksternal/ *payment point*.

m. Admin Umum dan Akuntansi (*Assisten*)

- 1) Memeriksa kebenaran transaksi keuangan
- 2) Memantau dan mengendalikan transaksi pembukuan rekening nasabah dan rekening keuangan kantor cabang.
- 3) Mengelola data informasi kondisi keuangan kantor cabang dan rekening nasabah.

n. Analis Kredit (*Assisten Manager*)

Mengelola kredit bermasalah dan hapus buku dalam rangka meningkatkan kualitas portofolio aset perkreditan Bank Sumsel Babel.

o. Legal dan Admin Kredit (*Assisten Manager*)

- 1) Memasarkan produk pendanaan (*funding*) dan jasa perbankan kepada nasabah/ calon nasabah.

- 2) Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah.
- 3) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah untuk menyusun peta bisnis.

3.3 Kegiatan Pemasaran Perusahaan

Bank Sumsel Babel sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perbankan melakukan kegiatan pemasaran yang didalamnya memasarkan produknya.

Kegiatan pemasaran pada Bank Sumsel babel meliputi:

- a. Melakukan penelitian atau pengumpulan data.
- b. Melakukan pengembangan produk.
- c. Memasrkan produk.

Karena produk yang ditawarkan oleh Bank Sumsel Babel juga banyak yang ditawarkan oleh perusahaan lain yang sejenis, maka tentunya diperlukan strategi pemasaran yang baik didalam memasarkan produk tersebut. Sehingga dapat menghadapi persaingan dan produk sejenis yag ditawarkan oleh perusahaan sejenis.

Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bank Sumsel Babel adalah sebagai berikut:

a. Penelitian atau pengumpulan data.

Penelitian atau pengumpulan data yaitu suatu proses penyusunan data sedemikian rupa untuk memudahkan dalam pelaksanaan analisa pengembangan produk. Untuk memudahkan analisa, data yang terkumpul disusun dalam bentuk *table* sesuai dengan kebutuhan, antara lain:

- 1) Jumlah rekening selama periode tertentu.
- 2) Jumlah saldo selama periode tertentu.
- 3) Kolektibilitas pinjaman selama periode tertentu.
- 4) Data segmentasi.
- 5) Riset pasar.
- 6) Data pesaing.
- 7) Dan lain sebagainya.

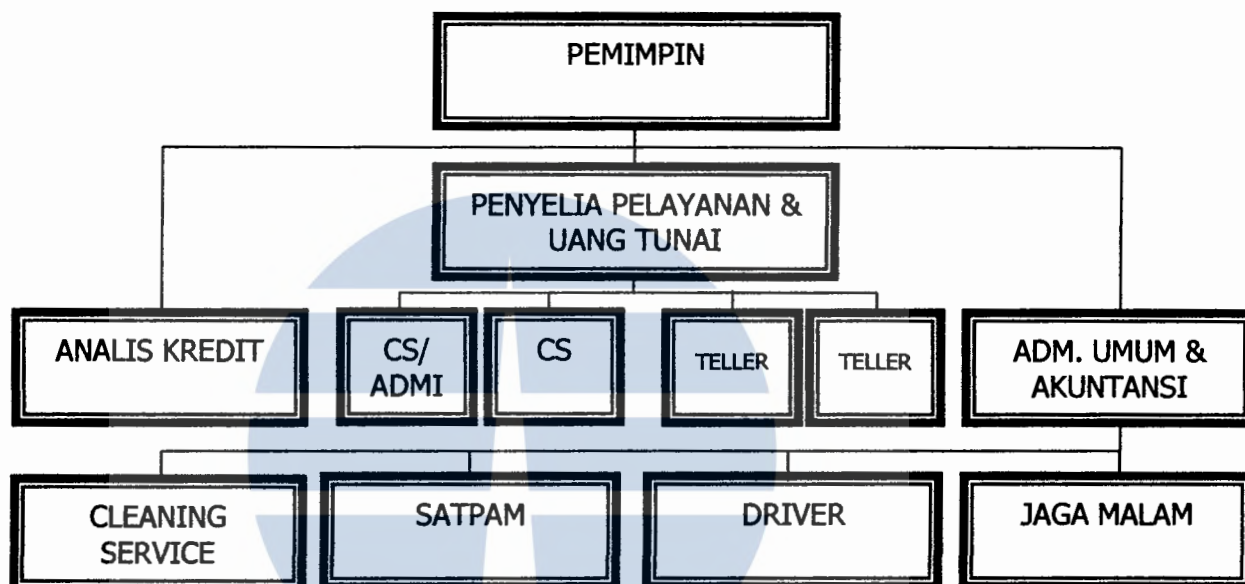
b. Pengembangan Produk.

Pengembangan produk adalah produk yang dibuat atau dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan daya saing yang sudah ada. Konsep pengembangan produk yang digunakan adalah:

- 1) Mengembangkan produk dan jasa perbankan yang dapat dijual yaitu produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan (sesuai dengan tuntutan pasar).
- 2) Filosofi dalam pengembangan produk adalah "mengembangkan produk yang bisa dijual, bukan menjual produk sesuai dengan kemampuan yang dimiliki".

4. Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk

Adapun struktur organisasi pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk adalah sebagai berikut:



**Bagan 4. 4. Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel
Cabang Pembantu Bingin Teluk
Sumber : BSB Cabang Pembantu Bingin Teluk**

B. Implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk

Pemberdayaan UMKM yang diatur melalui UU No.20 Tahun 2008 diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, kesempatan berusaha, dukungan dan perlindungan serta pengembangan usaha seluas-luasnya.

1. Pengertian UMKM

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sbb:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - 2) Memiliki hasil penjual tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang memenuhi kriteria sbb:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan
 - 2) Memiliki omzet tahunan lebih dari Rp.300.000.000,-s/d paling banyak Rp.2.500.000.000,-
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, yang memenuhi kriteria sbb:
 - 1) Memiliki aset bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- s/d paling banyak Rp. 10.000.000,- tidak termasuk tanah dan banguna
 - 2) Memiliki omzet tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000, s/d paling banyak Rp.50.000.000.000,-

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau omzet tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi, usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, usaha asing, dll.

2. Asas, tujuan, prinsip UMKM

a. Asas pemberdayaan UMKM

- 1) Kekeluargaan
- 2) Demokrasi ekonomi
- 3) Kebersamaan
- 4) Efisiensi berkeadilan
- 5) Berkelanjutan
- 6) Berwawasan Lingkungan
- 7) Kemandirian
- 8) Keseimbangan kemajuan, dan
- 9) Kesatuan ekonomi nasional

b. Tujuan Pemberdayaan UMKM

Untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

c. Prinsip pemberdayaan UMKM

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri

- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- 3) Usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar
- 4) Meningkatkan daya saing UMKM, dan
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

3. Penumbuhan iklim usaha UMKM

Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Informasi Usaha
- d. Kemitraan
- e. Perizinan Usaha
- f. Kesempatan Berusaha
- g. Promosi Dagang dan
- h. Dukungan kelembagaan

4. Pengembangan usaha UMKM

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. Produksi Pengolahan
- b. Pemasaran

- c. Sumber Daya Manusia dan
- d. Desain dan Teknologi

5. Pembiayaan dan penjaminan UMKM

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil melalui:

- a. BUMN dan BUMS dalam bentuk Pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya
- b. Usaha besar Nasional dan Asing
- c. Bantuan luar negeri dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat
- d. Memberikan insentif dalam bentuk persyaratan perizinan, keringanan tarif dll.

UMKM diberi akses terhadap peluang pinjaman atau kredit dengan cara:

- a. Kemampuan menyusun Studi Kelayakan Usaha (SKU)
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman dan
- c. Meningkatkan pemahaman, keterampilan teknis dan manajerial usaha
- d. Modal kerja dan investasi
- e. Mengembangkan lembaga penjamin kredit.

6. Kemitraan UMKM

Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan, baik kemitraan antar usaha

mikro, kecil dan menengah dan kemitraan UMKM dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. Inti Plasma
- b. Subkontrak
- c. Waralaba
- d. Perdagangan Umum
- e. Distribusi dan keagenan, dan
- f. Bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (Joint Venture) dan outsourcing.

7. Berdasarkan kegunaannya, kredit UMKM dibedakan menjadi 2 jenis, yakni:

- a. Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan salah satu jenis kredit UKM yang dapat membantu memulai bisnis. Kredit modal kerja digunakan pihak yang mengajukan kredit atau debitur untuk menambah modal usaha atau menjadi modal awal ketika akan membuka usaha. Jangka waktu kredit ini biasanya satu tahun dan dapat diperpanjang. Prinsipnya, kredit ini diambil sebelum membuka suatu usaha. Artinya, kita bisa memulai usaha dari nol melalui bantuan pinjaman ini.

Contoh penggunaan: Jika kita hendak membuka toko, kredit modal kerja digunakan untuk membeli rak, meja, dagangan, atau bisa juga mesin kasir.



b. Investasi

Kredit investasi digunakan debitur untuk memperluas usaha atau membuat usaha lebih maju. Kredit ini diberikan kepada pengusaha UKM yang telah melakoni usahanya selama beberapa waktu sebelumnya. Berbeda dengan kredit modal kerja, jangka waktu kredit investasi bisa disesuaikan menurut jumlah dana dan rencana investasi. Biasanya jangka waktunya hingga lima tahun.

Contoh penggunaan: Jika kita sudah memiliki bisnis rumah makan, kredit investasi bisa digunakan untuk membuka cabang atau memperluas bangunan rumah makan tersebut.

Adapun berdasarkan jaminan, kredit UKM juga punya 2 jenis, yaitu:

1) Kredit dengan Jaminan.

Sesuai dengan namanya, kredit dengan jaminan membutuhkan jaminan atau agunan berupa aset debitur. Jaminan yang diminta bank misalnya rumah, tanah, kendaraan atau bisnis UKM itu sendiri. Dengan meminta jaminan, bank hendak memastikan kredit yang dikucurkan dapat dilunasi sesuai dengan perjanjian. Pengusaha UKM dapat memilih kredit ini jika hendak meminjam dalam jumlah besar.

Syaratnya, nilai aset yang dijaminan sesuai dengan jumlah pinjaman yang digelontorkan bank. Jika kredit tersebut gagal dilunasi, bank akan menyita aset untuk menutup pinjaman.

Berikut ini kelebihan dan kekurangan kredit dengan jaminan:

Kelebihannya yaitu bunga relatif rendah, jangka waktu lebih panjang dan nominal pinjaman lebih besar, sedangkan kekurangannya yaitu harus memberi jaminan, proses pencairan pinjaman relatif lama dan kredit investasi dapat membantu pengembangan usaha Anda.

2) Kredit tanpa Agunan

Berkebalikan dengan kredit berjaminan, kredit tanpa agunan atau KTA tidak memerlukan aset debitur. Namun bukan berarti bank tak bisa menyita aset debitur jika terjadi gagal bayar. Bank akan menempuh jalur hukum untuk menutup jaminan yang tidak bisa dilunasi.

Proses pencairan KTA relatif lebih sederhana daripada kredit dengan jaminan. Apalagi jika kita mempunyai riwayat kredit yang baik alias selalu melunasi ketika meminjam uang dari bank. Pengusaha UKM disarankan menggunakan KTA jika tak memiliki aset untuk dijaminkan. Tapi, mengingat bunga KTA lumayan besar, rencana keuangan harus diperhitungkan dengan matang agar utang itu tidak menjadi beban.

Berikut ini kelebihan dan kekurangan KTA:

Kelebihannya yaitu tidak perlu memberi jaminan, proses pencairan pinjaman relatif cepat, sedangkan kekurangannya yaitu bunga relatif tinggi, jangka waktu lebih pendek dan nominal pinjaman kecil.

Itulah sejumlah jenis kredit UKM yang tersedia di Indonesia. Adapun syarat umum permohonan kredit UKM adalah:

- a) Mengisi form permohonan kredit
- b) KTP dan KK
- c) NPWP/SPT
- d) Rekening 3 bulan terakhir
- e) Kelengkapan surat-surat usaha

Jika hendak mengambil kredit UKM investasi, syarat tambahan yang diperlukan yakni dokumen rencana investasi serta laporan transaksi keuangan. Adapun jika saat ini kita berstatus pegawai, kita perlu menyertakan slip gaji.

Pembahasan terhadap implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk, dimana implementasi kebijakan tersebut terdiri dari 3 (tiga) dimensi sesuai dengan teori implementasi menurut Ripley and Franklin, yaitu:

- 1) Tingkat kepatuhan (*compliance*)
- 2) Rutinitas (*smoothly function routines*)
- 3) Dampak (*impact*)

Ketiga dimensi tersebut kemudian memiliki indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk kemudian diteliti.

- a. Tingkat kepatuhan (*compliance*)
 - 1) Kepatuhan Implementor (Petugas Perbankan)
 - a) Standar operasional prosedur (SOP)
 - b) Sosialisasi tentang kredit UMKM
 - c) Sejauh mana program UU No. 20 Tahun 2008 di implementasikan di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk
 - 2) Kepatuhan Nasabah

Sistem administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah
- b. Rutinitas Fungsi (Smoothly function routines)
 - 1) Informasi Implementor
 - 2) Informasi nasabah
 - 3) SOP dan Tupoksi Implementor
 - 4) Sarana dan Prasarana
- c. Dampak (Impact)
 - 1) Realisasi penyaluran kredit UMKM dari tahun ke tahun di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk
 - 2) Meningkatnya kesejahteraan
 - 3) Nasabah yang kembali melakukan penyaluran kredit

a. Tingkat Kepatuhan (*compliance*)

Dalam perspektif ini untuk melihat bagaimana UU No. 20 Tahun 2008 diaplikasikan.

1) Kepatuhan Implementor (Petugas Bank)

Dalam pelaksanaannya, implementor dalam hal ini pihak atau petugas perbankan mempunyai standar operasional prosedur (SOP) dalam penyaluran kredit supaya penyaluran kredit berjalan efektif dan efisien, dan (SOP) yang diterapkan oleh Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk adalah sebagai berikut:

a) Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain:

- (1) Latar belakang perusahaan
- (2) Maksud dan tujuan
- (3) Besarnya kredit dan jangka waktu
- (4) Cara pengembalian kredit
- (5) Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- (1) Akte notaries
- (2) Tanda daftar perusahaan (TDP)
- (3) Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
- (4) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- (5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- (6) Foto copy sertifikat jaminan

b) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

c) Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

d) On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

e) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

f) Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup:

- (1) Jumlah uang yang diterima
- (2) Jangka waktu
- (3) Biaya-biaya yang harus dibayar

g) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

h) Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i) Penyaluran/penarikan

adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu: sekaligus dan secara bertahap

Dalam penyaluran kredit, pihak Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang dijelaskan diatas.

Adapun wawancara dengan Analis Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk adalah sebagai berikut:

“Dalam penyaluran kredit, baik kredit umum maupun kredit UMKM, kami menerapkan (SOP) dan sebagai pedoman kami supaya kredit ini berjalan secara efektif dan efisien, (wawancara, 15 Maret 2016)”.

“Dalam menjalankan tugas kami memang berpedoman kepada aturan yang ada, akan tetapi dalam prakteknya kami memberikan kelonggaran dan bantuan kepada nasabah tanpa menyalahi aturan, contohnya membantu nasabah dalam administrasi,(wawancara, 15 Maret 2016)”.

“Alasan kami menolak pengajuan kredit dari calon nasabah adalah:

1. BI Checking
 - a. Pemohon yang mengajukan kredit tercatat sebagai debitur yang macet di lembaga keuangan (Bank/ non Bank).
 - b. Untuk usaha yang sama sudah dan sedang dibiayai oleh lembaga keuangan.
2. Dari segi jaminan, jaminan yang diajukan tidak mencukupi untuk permohonan yang diajukan.
3. Dari segi usaha, usaha yang dimiliki tidak sesuai, penghasilan usahanya tidak mencukupi untuk membayar angsuran”.(wawancara, 15 Maret 2016)

“Dalam pelaksanaannya, jangka waktu kredit UMKM di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk dari 1 tahun-5 tahun, dan ini juga sudah sesuai dengan pertauran yang ada”.(wawancara, 15 Maret 2016)

“Kredit UMKM yang bisa diajukan di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk mulai Rp 5.000.000 – Rp 500.000.000, sesuai dengan pengajuan dan jaminan yang dimiliki nasabah, dan ini juga sudah sesuai dengan pertauran yang ada”.(wawancara, 15 Maret 2016).

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyajikan tabel 4.1 untuk menyimpulkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Analis kredit pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk:

Tabel 4.1. Kepatuhan Implementor (analisis kredit)

No	Uraian	Keterangan
1	Acuan pihak perbankan dalam penyaluran kredit	Pihak perbankan berpedoman pada standar operasional prosedur(SOP)
2	Sesuai dengan sop dan aturan yang ada	Kami menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi kami siap membantu nasabah
3	Alasan ditolaknya pengajuan kredit	Salah satunya pemohon yang mengajukan kredit tercatat sebagai debitur yang macet di lembaga keuangan (Bank/ non Bank).
4	Jangka waktu kredit,khususnya kredit UMKM	1 – 5 tahun
5	Jumlah kredit yang dapat diajukan	Rp 5.000.000 – Rp 500.000.000

Dari tabel 4.1 diatas peneliti menyimpulkan bahwa pihak perbankan menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, akan tetapi pihak perbankan juga memberikan kelonggaran dan bantuan kepada calon nasabah dalam pengajuan kredit, contohnya dalam kelengkapan administrasi.

Adapun wawancara dengan Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang

Pembantu Bingin Teluk adalah sebagai berikut:

"Sosialisasi tentang kredit UMKM dan produk perbankan lainnya seperti tabungan dan deposito sudah dilaksanakan oleh Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk pada saat kantor ini dibuka tahun 2009 dan pada saat saya mulai menjabat di bulan februari tahun 2014 yang bekerja sama dengan pemerintah setempat, perangkat desa dan masyarakat di kantor Camat Rawas Ilir ".(wawancara, 15 Maret 2016).

"Pada dasarnya kami siap membantu nasabah dalam pengajuan kredit tanpa menyalahi aturan yang ada, dan kami merangkul masyarakat demi pertumbuhan ekonomi yang baik". (wawancara 15 Maret 2016).

"Kami siap membantu, dalam hal ini menemani nasabah ke kantor notaris dalam mengurus administrasi, contohnya mengurus peningkatan status kepemilikan jaminan sebagai agunan di kantor kami". (wawancara, 15 Maret 2016)

"Secara umum UU No. 20 Tahun 2008 mengenai kredit UMKM sudah dijalankan di sini, dan dikatakan cukup baik karena hampir mendekati target yang telah dicanangkan oleh manajemen, bahkan Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk merupakan cabang Bank Sumsel Babel yang sukses dalam hal penyaluran kredit UMKM di daerah Muratara, Musi Rawas dan Lubuklinggau dikarenakan secara geografis Bank ini berdiri di daerah industri dan perkebunan".

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyajikan tabel 4.2 untuk menyimpulkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk:

Tabel 4.2. Kepatuhan Implementor (Pimpinan)

NO	Uraian	Keterangan
1	Pengenalan produk perbankan	Dengan sosialisasi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2014
2	Kelengkapan administrasi	Pihak perbankan bersedia membantu dalam kelengkapan administrasi.
3	Pelayanan perbankan dalam membantu nasabah	Pihak perbankan mendampingi nasabah ke kantor perizinan dan notaries
4	Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008	Sudah dilaksanakan

Dari tabel 4.2 diatas peneliti menyimpulkan bahwa UU No.20 Tahun 2008 tentang kredit UMKM sudah dilaksanakan dan pihak perbankan membantu nasabah dalam pelaksanaannya.

Menurut Edwards III dalam Widodo (2011: 96-110) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan

guna mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi (kecenderungan) dan struktur birokrasi.

Dari pembahasan kepatuhan implementor diatas dikaitkan dengan salah satu faktor yang dijelaskan oleh Edward III yaitu faktor struktur birokrasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operating Procedures (SOPs)* dan melaksanakan fragmentasi.

2) Kepatuhan Nasabah

Nasabah merupakan bagian terpenting dalam organisasi perbankan. Semua aktivitas dalam perbankan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan harus dipertanggungjawabkan, karena aktivitas perbankan sangat dipengaruhi oleh nasabah. Dalam prakteknya sering kita dengar nasabah adalah raja di dalam dunia perbankan.

Peneliti melakukan wawancara dengan nasabah yang pertama.

Adapun hasil wawancaranya yaitu:

"Saya mendapat informasi tentang kredit UMKM dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perbankan dari dari masyarakat setempat yang mempunyai usaha, dimana hampir seluruh pengusaha disini memanfaatkan program ini. (wawancara 18 Maret 2016)"

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan nasabah yang

kedua, adapun hasilnya sebagai berikut:

“Kendala kami dalam pengajuan kredit UMKM ini adalah masalah administrasi dan masalah jaminan, selama ini kami tidak begitu mempedulikan masalah administrasi dan surat pengakuan hak seperti akta notaris dan sertifikat. (wawancara 18 Maret 2016)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan nasabah yang ketiga, adapun hasilnya sebagai berikut:

“Setelah kami mendapatkan fasilitas kredit UMKM yang diberikan oleh bank, dalam prakteknya terkadang kami menemui masalah dalam pembayaran angsuran, mayoritas penduduk disini mengandalkan hasil perkebunan untuk membayar angsuran kredit, akan tetapi kami tidak bisa mengelak keadaan masalah lingkungan dan iklim karena dalam setiap tahun perkebunan ditempat kami pasti mengalami musim trek, yang artinya perkebunan kami tidak menghasilkan atau hanya menghasilkan sedikit. (wawancara, 18 Maret 2016)

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyajikan tabel 4.3 untuk menyimpulkan hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk:

Tabel 4.3. Kepatuhan nasabah

No	Uraian	Keterangan
1	Apakah Bapak tahu tentang administrasi	Ya, saya tahu
2	Sejauh mana Bapak mengetahui tentang administrasi	Saya mengenal administrasi sebagai data diri
3	Setelah mengenal lebih jauh, apakah data yang dimiliki oleh Bapak sudah lengkap	Belum, karena sejauh ini saya belum berhubungan langsung dengan lembaga pemerintahan.
4	Apakah yang akan Bapak lakukan untuk melengkapi administrasi	Karena ini berhubungan dengan pihak perbankan, maka saya akan minta bantuan pihak Bank untuk membantu saya dalam melengkapi administrasi
5	Apakah yang akan Bapak lakukan dengan mendapatkan fasilitas kredit UMKM ini	Saya akan menggunakan uangnya untuk mengembangkan usaha
6	Dalam perjalannya, apa yang menjadi kendala dalam pembayaran angsuran kredit	Lingkungan dan iklim, musim trek dimana perkebunan tidak maksimal untuk menghasilkan

Dari tabel 4.3 diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat sudah mengetahui adanya program kredit UMKM dari pemerintah melalui perbankan dan adanya faktor yang menghambat jalannya program kredit UMKM, seperti faktor administrasi dan faktor lingkungan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pihak Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk, (Penyelia, Analisis Kredit, dan Admin Kredit), wawancara dilakukan pada tanggal 21 maret 2016, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Jumlah pengajuan kredit yang masuk di kantor periode januari 2014 – april 2016 adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) berkas.

Tabel 4. 4. Jumlah Pengajuan Kredit Periode Januari 2014 – April 2016

No	Nama	Keterangan
1	Gunardi	Kredit Investasi
2	M. Sai	Kredit KMK Sawit
3	Juliana Sari	Kukpedes UMBT
4	Thamrin	Kredit Investasi
5	Edi Hartono	Kukpedes UMBT
6	Ahmad Fariadi	Kredit Investasi
7	M. Nasir	Kredit Investasi
8	Ahmad Mirza Fahri	Kredit Investasi
9	Lasmi	Kredit Investasi
10	Mat Turidi	Kredit KMK Bengkel
11	Hambali	Kredit Investasi
12	Sudiyono	Kredit Investasi
13	Candra Elfizon	Kredit Investasi
14	Husnedi	Kredit Investasi
15	Wen Rizal	Kredit Investasi
16	Ummul Khoiriah	Kukpedes UMBT
17	Sarinah Dewi Harti	Kukpedes UMBT
18	Helyawati	Kukpedes UMBT
19	Eka Sariwati	Kukpedes UMBT

No	Nama	Keterangan
20	Mat Turidi	Kredit KMK
21	Edi Harto	Kredit Investasi
22	Suwarno	Kredit Investasi
23	Maryanto	Kredit Investasi
24	Teguh Santoso	Kredit Investasi
25	Warsito	Kredit Investasi
26	Kurnia Aini	Kukpedes UMBT
27	Masnawati	Kredit Investasi
28	Al Kausar	Kredit Investasi
29	Jumirah	Kredit Investasi
30	Habiyanto AZ	Kredit Investasi
31	Sugianto	Kredit Investasi
32	Habiyanto AZ	Kredit Investasi
33	Eko Candra Irawan	Kredit Investasi
34	Eka Puspita Sari	Kredit Investasi
35	Parno	Kredit Investasi
36	Darmaji	Kredit Investasi
37	Cik Din	Kredit Investasi
38	Pono	Kredit Investasi
39	Cipto Pawiro	Kredit Investasi
40	Budiono	Kredit Investasi
41	Makhfiroh	Kredit Investasi
42	Wahyono	Kredit Investasi
43	Suyanto	Kredit Investasi
44	Nursuci	Kredit Investasi
45	Hendri Susanto	Kredit Investasi
46	Agus Suprpto	Kredit Investasi
47	Sumali	Kredit Investasi
48	Kusiran	Kredit Investasi
49	Sarjono Bin Jahanan	Kredit Investasi
50	Supriyadi	Kredit Investasi
51	Sulistiyawati	Kredit Investasi
52	Apriansyah	Kredit Investasi
53	Mustofa Hakim	Kredit Investasi
54	Wen Rizal	Kredit Investasi
55	Husna Latifa	Kredit Investasi
56	Dien Aprilia	Kredit Investasi
57	Hayati	Kredit Investasi
58	Wahyono	Kredit Investasi
59	Marso Suwito	Kredit Investasi

No	Nama	Keterangan
60	Dadang Hirawan	Kredit Investasi
61	Giono	Kredit Investasi
62	Kris Murni Wanti	Kredit Investasi

“ adapun jumlah berkas kredit yang disetujui sebanyak 48 (empat puluh delapan) berkas, terlampir.

“Kemudian adapun jumlah berkas kredit yang ditolak sebanyak 14 (empat belas) berkas kredit”.

“Kemudian ada 17 (tujuh belas) berkas kredit yang disetujui yang dibantu oleh pihak perbankan, bantuannya seperti masalah administrasi dan pengesahan jaminan dan pengakuannya”.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan UU No. 20 Tahun 2008 pada masyarakat Kecamatan Rawas Ilir pada khususnya dan Kabupaten Musi Rawas Utara pada umumnya sudah dilaksanakan akan tetapi masih adanya kendala dalam pelaksanaannya, seperti masalah lingkungan, administrasi dan pengakuan pengesahan hak yang dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan kredit.

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. (Haedar : 2010).

Menurut Grindle (1980:5), konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi yang salah satunya adalah kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Menurut Hogwood & Gunn (1978:1986) untuk mencapai implementasi yang sempurna adalah mungkin manakala dapat mengontrol seluruh sistem administrasi sehingga kondisi-kondisi sebagaimana yang mereka sebutkan diatas dapat dipenuhi, meski juga menyadari bahwa kondisi demikian nyaris mustahil terjadi di dunia nyata. Namun mereka memandang bahwa proposisi-proposisi tersebut adalah syarat normatif yang harus diupayakan agar implementasi berjalan menuju sempurna. Sayangnya di dunia nyata selain kondisi demikian sangat sulit bahkan mustahil dipenuhi sepenuhnya.

Dari pembahasan kepatuhan nasabah diatas dikaitkan dengan teori yang dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi program pemerintah dalam hal ini UU No.20 Tahun 2008 mengenai Kredit UMKM terdapat masalah yaitu administrasi, dikarenakan masih ada masyarakat ayng tidak melengkapi administrasinya.

b. Rutinitas Fungsi (*Smoothly function routines*)

Rutinitas fungsi ini adalah tahapan tertentu pada suatu program yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas dan fungsi suatu pelaksanaan program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang akan dihadapi.

1) Informasi Impelementor

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, peran informasi sangat penting sehingga harus disajikan dengan baik oleh penyedia supaya dapat diterima dengan baik. Dalam hal ini yang menjadi dasar pemberitahuan secara langsung kepada masyarakat ialah sosialisasi.

Adapun wawancara peneliti dengan pihak perbankan, dalam hal ini melalui admiin kredit yaitu:

“Sebelumnya kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai produk perbankan dan program kredit UMKM yang digagas oleh pemerintah, dan saat ini kami memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar kantor”. (wawancara, 22 Maret 2016).

“Sosialisasi telah dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2014, dan untuk selanjutnya kami memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung dan setiap saat”. (wawancara, 22 Maret 2016).

Tabel 4. 5. Inforrmasi Implementor

No	Uraian	Keterangan
1	cara penyampaian informasi	Dengan sosialisasi dan penyampaian langsung kepada masyarakat
2	Waktu penyampaian informasi	Sosialisasi pada tahun 2009 dan 2014 dan saat ini informasinya diberikan setiap saat

Dari tabel 4.5 diatas, peneliti menyimpulkan bahwa informasi tentang program kredit UMKM telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sosialisasi dan saat ini informasinya diberikan kepada masyarkat setiap saat. Akan tetapi

masih ada juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang kredit UMKM dikarenakan mereka sibuk berkebur.

Menurut Ais zakiyudin (2012:10) “ informasi merupakan satu sumber daya yang sangat diperlukan dalam suatu organisasi dan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”.

Dari hasil pembahasan diatas dan dikaitkan dengan teori yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi yang dilakukan oleh implementor sudah dilakukan, tetapi belum begitu maksimal karena untuk informasi yang secara khusus (sosialisasi) sampai saat ini baru dilakukan 2 (dua) kali.

2) Informasi nasabah

Adapun wawancara peneliti dengan nasabah mengenai informasi program kredit UMKM adalah sebagai berikut:

“Ya, saya sudah tahu tentang program kredit UMKM ini melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perbankan”. (wawancara, 23 Maret 2016).

“Saya mengetahui produk ini selain dari sosialisasi, saya juga mengetahui produk ini melalu televisi dan masyarakat setempat”. (wawancara, 23 Maret 2016)

“Menurut saya, program kredit UMKM ini sangat baik dan dapat membantu masyarakat di daerah ini yang mayoritas jadi petani dan pengusaha, dan dengan program ini juga masyarakat dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya”. (wawancara, 24 Maret 2016)

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyajikan tabel untuk menyimpulkan hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk:

Tabel 4. 6. Informasi nasabah

No	Uraian	Keterangan
1	Apakah sudah tahu dengan program kredit UMK	Ya, saya sudah tahu
2	Informasi tentang kredit UMKM	Sosialisasi, masyarakat, dan televisi
3	Tanggapan dengan adanya program kredit UMKM	Sangat positif dan dapat membantu meningkatkan perekonomian.

Dari tabel 4.5 diatas peneliti menyimpulkan bahwa informasi tentang program kredit UMKM ini sudah tersampaikan dengan baik ke masyarakat.organisasi dan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna.

Menurut Azhar Susanto (2004:46) menyatakan bahwa “informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat”.

Dari pembahasan informasi nasabah yang dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan teori diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah ada informasi yang diberikan oleh pihak perbankan, tetapi masih belum maksimal karena pada saat sosialisasi tidak seluruh masyarakat yang mengetahuinya karena mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing seperti berdagang dan berkebun.

3) Standar operasioanl prosedur (SOP) dan Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Implementor

Adapun peneliti melakukan wawancara dengan implementor atau pihak Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk, (Penyelia, Analis Kredit, dan Admin Kredit), wawancara dilakukan pada tanggal 21 maret 2016, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“ Analis kredit bersama penyelia/pengelola dan atau pejabat bank terkait lainnya melakukan seleksi dan investigasi terhadap perusaha/calon debitur yang memenuhi criteria untuk diberikan kredit:

1. Debitur bank sendiri yang pernah dibiayai selama 2 (dua) tahun terakhir
2. Debitur bank lain:
 - a. sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia
 - b. Interview dengan debitur

“Bagian yang menangani penyaluran kredit baik kredit umum maupun kredit UMKM adalah Pimpinan, Penyelia, Analis kredit, dan Admin kredit”.

“Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

Penyelia dan admin kredit mempunyai tupoksi sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang produk perbankan termasuk kredit umum dan UMKM.
2. Menerima dan mencatat berkas pengajuan kredit yang masuk.

Analis kredit mempunyai tupoksi sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap informasi mengenai calon nasabah
2. Memverifikasi berkas yang masuk
3. Menilai kelayakan usaha
4. Melakukan wawancara dengan calon nasabah

Pimpinan

1. Menilai kelayakan usaha
2. Menetapkan dan mengambil keputusan disetujui atau ditolaknya pengajuan kredit.

“Dalam pelaksanaannya kami memiliki dan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku secara umum, dan ini sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyajikan tabel untuk menyimpulkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk:

Tabel 4. 7. SOP dan Tupoksi Implementor

No	Uraian	Keterangan
1	Prosedur dalam penyaluran kredit	Dijalankan dengan berpedoman pada buku pedoman pegawai (BPP) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2	Bagian yang menangani kredit	Pimpinan, penyelia, analis kredit, admin kredit
3	Tupoksinya	Memiliki tugas masing-masing tetapi saling berhubungan
4	Jalannya SOP	Sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dari tabel 4.7 di atas, peneliti menyimpulkan bahwa SOP dan Tupoksi yang ada di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk sudah cukup baik, akan tetapi harus ada penambahan karyawan. Analis kredit minimal 2 (dua) orang, admin kredit 2 (dua) orang dan harus memiliki kepala bagian kredit yang berfungsi sebagai coordinator dalam penyaluran kredit.

Menurut Alfatih (2010:15) menyatakan implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Dari pembahasan ini memang berbanding lurus dengan teori yang dikemukakan diatas bahwa suatu bagian sudah ditetapkan dan dalam penerapannya harus dijalankan sesuai dengan amanah yang diberikan supaya tercapai tujuan bersama.

4) Sarana dan Prasarana

Pengertian Sarana prasarana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.

Peneliti melakukan wawancara dengan analis kredit pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

"Sarana pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk sudah baik dengan adanya mobil dinas sebagai kendaraan operasional, tetapi prasarananya kurang baik karena jalan yang merupakan infrastruktur disini sebagian besar belum di aspal dan kalau hujan sering terkena banjir serta letak suatu bangunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit juga jaraknya jauh ". (wawancara, 23 Maret)

Peneliti melakukan wawancara dengan penyelia pelayanan dan uang tunai dan analisis kredit, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

"Sistem Komputerisasi yang ada di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk masih menggunakan sistem DOS yang merupakan sistem lama sehingga proses komputerisasinya belum begitu cepat, serta jaringan komunikasi yang dibutuhkan oleh sistem komputer masih belum maksimal dikarenakan Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk terletak cukup jauh dari kabupaten Muratara, sehingga hanya mendapatkan sinyal dari salah satu provider telekomunikasi saja. Kami sudah mengajukan ke kantor pusat untuk pengadaan alat penangkap sinyal telekomunikasi dan saat ini masih dalam proses ". (wawancara, 24 Maret 2016)

"Saat ini kami terkendala untuk melakukan layanan prima karena kurangnya sumber daya manusia (SDM), dimana untuk bagian kredit kami hanya memiliki 1 (satu) orang pegawai, sedangkan cakupan kredit itu luas tidak hanya kredit UMKM saja akan tetapi ada kredit lain dan dalam kerjanya bagian kredit meliputi banyak bidang pekerjaan yaitu sebagai tenaga pemasaran yang melakukan sosialisasi, survei dan lain-lain. Jadi bisa dipastikan tugas pokok dan fungsinya terganggu. Sehingga kami masih membutuhkan beberapa pegawai untuk bagian kredit". (wawancara, 24 Maret 2016)

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyajikan tabel untuk menyimpulkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk:

Tabel 4. 8. Sarana dan Prasarana

No	Uraian	keterangan
1	Kendala dalam penyaluran kredit (non teknis)	Infrastruktur yang kurang memadai, jarak dan lokasi.
2	Kendala dalam penyaluran kredit (teknis)	Sistem komputerisasi dan jaringan komunikasi
3	Kendala dalam penyaluran kredit (teknis)	Kurangnya SDM yang memadai

Dari tabel 4.8 diatas peneliti menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin teluk masih memiliki kendala, baik kendala yang teknis maupun kendala non teknis. Oleh karena itu kendala tersebut harus bisa diatasi demi terciptanya tujuan manajemen dan demi pelayanan yang prima kepada nasabah.

Menurut George C. Edward II (dalam Subarsono, 2012: 91). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Dan dalam pembahasan ini adalah staf dan fasilitas.

Staf: Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Sedangkan,

Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dari pembahasan mengenai sarana dan prasarana kemudian dikaitkan dengan teori diatas dapat disimpulkan bahwa staf (SDM) dan fasilitas pendukung mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan dan kegiatan organisasi.

c. Dampak (*impact*)

- 1) Apakah kredit, khususnya kredit UMKM berdampak pada penghasilan perbankan?

Adapun wawancara peneliti dengan Pimpinan Bank Sumsel Babel

Cabang Pembantu Bingin Teluk adalah sebagai berikut:

“Menurut saya penyaluran kredit termasuk kredit UMKM merupakan salah satu sumber pendapatan seektor perbankan dimana saja tidak terkecuali disini, karena bunga kredit tersebut menjadi keuntungan perusahaan dan dengan keuntungan itu kami mendukung dan ikut berperan bersama pemerintah dalam pembangunan. Keuntungan ini kami berikan kepada pemerintah dalam bentuk pembagian saham atau deviden yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang mana pemerintah merupakan pemegang saham, dan dengan keuntungan ini kami juga menyalurkan corporate social responsibility (CSR) untuk daerah”.
(wawancara, 28 Maret 2016)

Tabel 4. 9. Meningkatkan pendapatan dan berperan dalam pembangunan daerah

No	Uraian	Keterangan
1	Apakah penyaluran kredit merupakan salah satu faktor pendapatan	Ya, pendapatan kami salah satunya bersumber dari penyaluran kredit
2	Kerja sama dengan pemerintah	Ya, karena kami bank pemerintah daerah, kami memberikan deviden yang mana merupakan salah satu PAD untuk pemerintah daerah
3	Bukti ikut dalam pembangunan daerah	Kami ikut dalam pembanguna melalui dana CSR, sesuai dengan slogan kami “mitra anda membangun daerah”

Dari tabel 4.9 di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan perbankan salah satunya dari penyaluran kredit, dan karena Bank Sumsel Babel milik Pemerintah Daerah maka mereka ikut membangun daerah dengan menyumbangkan deviden sebagai PAD daerah dan memberikan bantuan melalui CSR.

- 2) Bagaimana kinerja kredit pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk khususnya kredit UMKM?

Adapun wawancara peneliti dengan Analis kredit Bank Sumsel

Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk adalah sebagai berikut:

“Secara keseluruhan penyaluran kredit di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk sudah baik, dimana angka kredit macet masih bisa dikatakan “wajar” karena masih di bawah angka 5% sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia”. (wawancara, 28 Maret 2016)

“Penyaluran kredit UMKM di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk periode januari 2014 – maret 2016 sebanyak 48 berkas pengajuan kredit yang disetujui dari 62 berkas kredit yang masuk”.(wawancara, 28 Maret 2016)

“Penyaluran kredit UMKM di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk pada tahun 2014 sebanyak 26 berkas yang disetujui, dan pada tahun 2015 sebanyak 16 berkas yang disetujui, dilihat dari data ini bahwa terjadi penurunan penyaluran kredit UMKM mengalami penurunan, tetapi bukan berarti pelayanan kami buruk, memang berkas yang masuk pada tahun 2015 lebih sedikit dari tahun 2014”.(wawancara, 28 Maret 2016)

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyajikan tabel untuk memudahkan peneliti menyimpulkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Analis kredit sebagai berikut:

Tabel 4. 10. Kinerja kredit

No	Uraian	keterangan
1	Kinerja penyaluran kredit secara umum	Baik, dibuktikan dengan tingkat kredit macet yang masih dibawah standar
2	Penyaluran kredit UMKM periode januari 2014 – maret 2016	Dari 62 berkas kredit yang masuk sebanyak 48 berkas kredit yang disetujui, dapat dikatakan baik karena realisasi di atas 70%
3	Jumlah berkas kredit UMKM yang masuk pada tahun 2014 dan 2015	Mengalami penurunan

Dari tabel 4.10 di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja penyaluran kredit di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk sudah baik, dimana tingkat kredit macet masih dibawah standar Bank Indonesia dan realisasi kredit UMKM pada periode januari 2014 – maret 2016 cukup baik karena persentasenya diatas 70%.

Untuk memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk

undang-undang, peraturan pemerintah, atau program). (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:69)

Dari pembahasan mengenai kinerja untuk menilai keberhasilan implementasi dan dikaitkan dengan teori diatas maka ditarik kesimpulan bahwa para implementor dalam melaksanakan kebijakan harus berdasarkan dengan dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program).

- 3) Adakah nasabah kredit yang sudah lunas kembali mengambil kredit?

Adapun wawancara peneliti dengan Analis kredit Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk adalah sebagai berikut:

“Dalam penyaluran kredit UMKM yang sudah berjalan sejak tahun 2008 ini, sudah banyak masyarakat yang mengambil kredit UMKM untuk kepentingan usaha dan modal kerja, dimana sudah ada nasabah yang sudah lunas dan mereka kembali mengajukan kredit karena tawaran dari kami dan mereka juga membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Dasar kami memberikan penawaran kredit kepada nasabah yang sudah lunas adalah track record atau daftar rekam jejak kredit mereka yang lancar”.(wawancara, 28 Maret 2016). Data terlampir untu nasabah yang sudah lunas dan kembali mengambil kredit.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak perbankan dan masyarakat saling bekerja sama dengan pemerintah dan menjalankan amanat UU No.20 Tahun 2008 tentang kredit UMKM untuk menumbuhkan perekonomian khususnya di kabupaten Musi Rawas Utara.

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah- masalah yang dihadapi; (Haedar : 2010).

Dari pembahasan mengenai apakah ada nasabah yang mengambil kembali kredit atau memperpanjangnya dan dikaitkan dengan teori diatas maka ditarik kesimpulan bahwa dengan lancarnya rutinitas, dalam hal ini tugas dan tanggung jawab dari implementor dan nasabah berjalan dengan baik dan tidak adanya masalah.

- 4) Apakah setelah mengambil kredit UMKM usahanya tambah maju? Adapaun wawancara peneliti dengan nasabah yang mengambil kredit UMKM di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk adalah sebagai berikut:

“Kami berterima kasih dan terbantu dengan adanya amanat UU No.20 Tahun 2008 tentang kredit UMKM, dimana kami dapat mengajukan kredit untuk tambahan modal dan pengembangan usaha. Setelah saya mendapat kredit UMKM dari Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk usaha saya yang tadinya hanya warung manisan berubah menjadi mini market yang menyediakan kebutuhan pokok yang lebih lengkap dan membuka lapangan kerja, terima kasih pemerintah dan terima kasih Bank Sumsel Babel”.(wawancara, 29 Maret 2016)

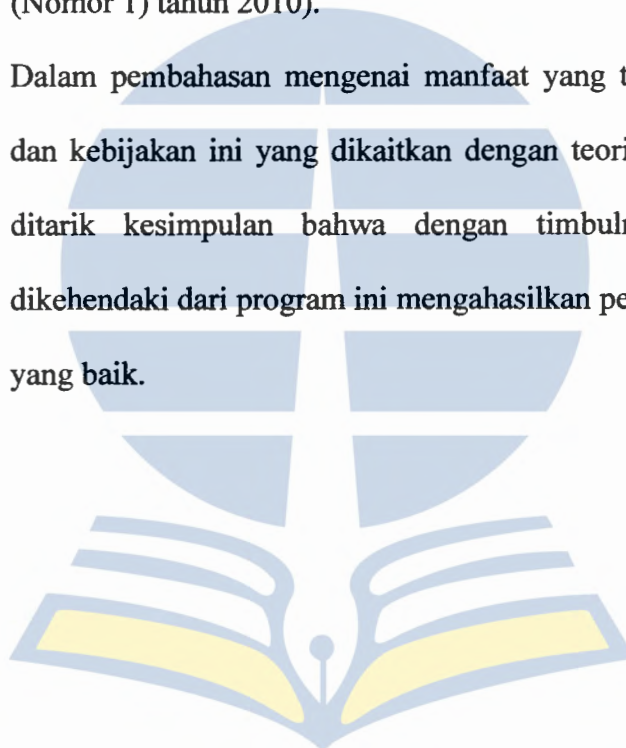
“saya sangat terbantu dengan adanya penyaluran kredit, usaha saya bengkel motor, dimana sebelum mengambil kredit UMKM bengkel saya hanya menyediakan jasa perbaikan, akan tetapi saat ini bengkel motor saya juga menyediakan suku cadang sepeda motor hamper seluruh merk”.(wawancara, 29 Maret 2016)

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya program kredit UMKM dari pemerintah yang berdasarkan UU No.20 Tahun 2008, masyarakat terbantu untuk pengambilan

modal dan pengembangan usahanya. Dimana dapat menumbuhkan perekonomian dan lapangan kerja di daerah itu sendiri.

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. (dalam Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik*: Volume 1 (Nomor 1) tahun 2010).

Dalam pembahasan mengenai manfaat yang timbul dari program dan kebijakan ini yang dikaitkan dengan teori diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan timbulnya manfaat yang dikehendaki dari program ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kebijakan dan aturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang sudah diimplementasikan dengan baik pada salah satu Bank milik pemerintah, dalam hal ini Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang dapat menghambat penyaluran kredit UMKM, seperti dari pihak perbankan, masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas sarana dan prasarana yang belum maksimal. Kemudian dari masyarakat dan nasabah, terdapat masalah dalam hal administrasi, baik dalam kelengkapan berkas maupun legalitas jaminan.

Implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang penyalura kredit usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), (studi di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara) mengalami kendala sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan

- a. Pihak perbankan menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, akan tetapi pihak perbankan juga memberikan kelonggaran dan bantuan kepada calon nasabah dalam pengajuan kredit, contohnya dalam kelengkapan administrasi.

- 1) Kredit UMKM sudah dilaksanakan dan pihak perbankan mendukung dan membantu nasabah dalam pelaksanaannya.

2) Masyarakat sudah mengetahui adanya program kredit UMKM dari pemerintah melalui perbankan dan adanya faktor yang menghambat jalannya program kredit UMKM, seperti faktor administrasi dan faktor lingkungan.

2. Rutinitas Fungsi

- a. Informasi tentang program kredit UMKM telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sosialisasi dan saat ini informasinya diberikan kepada masyarakat setiap saat. Akan tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang kredit UMKM dikarenakan mereka sibuk berkebur.
- b. Informasi tentang program kredit UMKM ini sudah tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
- c. SOP dan Tupoksi yang ada di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk sudah cukup baik, akan tetapi harus ada penambahan karyawan. Analisis kredit minimal 2 (dua) orang, admin kredit 2 (dua) orang dan harus memiliki kepala bagian kredit yang berfungsi sebagai koordinator dalam penyaluran kredit.
- d. Sarana dan prasarana yang ada di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin teluk masih memiliki kendala, baik kendala yang teknis maupun kendala non teknis. Oleh karena itu kendala tersebut harus bisa diatasi demi terciptanya tujuan manajemen dan demi pelayanan yang prima kepada nasabah.

3. Dampak (*impact*)

- a. Pendapatan perbankan salah satunya dari penyaluran kredit, dan karena Bank Sumsel Babel milik Pemerintah Daerah maka mereka ikut membangun daerah dengan menyumbangkan deviden sebagai PAD daerah dan memberikan bantuan melalui CSR.
- b. Kinerja penyaluran kredit di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk sudah baik, dimana tingkat kredit macet masih dibawah standar Bank Indonesia dan realisasi kredit UMKM pada periode januari 2014 – maret 2016 cukup baik karena persentasenya diatas 70%.
- c. Pihak perbankan dan masyarakat saling bekerja sama dengan pemerintah dan menjalankan amanat UU No.20 Tahun 2008 tentang kredit UMKM untuk menumbuhkan perekonomian khususnya di kabupaten Musi Rawas Utara.
- d. Dengan adanya program kredit UMKM dari pemerintah yang berdasarkan UU No.20 Tahun 2008, masyarakat terbantu untuk pengambilan modal dan pengembangan usahanya. Dimana dapat menumbuhkan perekonomian dan lapangan kerja di daerah itu sendiri.

B. SARAN

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian tentang Implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Secara Praktis

Kepada Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau dan Cabang Pembantu Bingin Teluk diharapkan untuk dapat lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kebijakan UU No. 20 Tahun 2008 dan pentingnya tertib dalam beradministrasi.



Daftar Pustaka

- Agustino, L (2006), "*Analisis Kebijakan Publik*". Jakarta: Rineka Cipta
- Anderson, JE (1984), "*Publik Policy Making*", Washington: Congressional Quarterly Press"
- Grindle, M.S (1980), "*Politics and Policy Implementation in The Third World Jersey*"
- Moleong, L. J (2010) "*Metode Penelitian Kualitatif*". Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Widodo (2011) "*Implementasi Kebijakan*", Jakarta
- Mazmanian, D. H & Sabatier, P.A (1983) "*Implementation and Public Policy*", New York: Harper Coliins.
- Nasir, M (2010), "*Metode Penelitian. Bandung*": Galis Indonesia
- Akib, Haedar. (2010). "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, No.1, 1-3
- Alfatih, Andi. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press.
- Susanto, Azhar. (2004). *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Bandung: Lingga Jaya.
- Zakiyudin, Ais. (2012). *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Perundang – Undangan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyaluran UMKM.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank.

Indonesia Nomor 14/22/PBI/2015 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan
Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Implementasi.

Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05 Tahun 2008

Buku Pedoman Pegawai (BPP) Bank Sumsel Babel



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

a. Tingkat kepatuhan

- Implementor (petugas bank)

1. apakah pedoman yang menjadi acuan pihak perbankan dalam penyaluran kredit?
2. apakah pihak perbankan berpedoman penuh dengan aturan yang ada?
3. apakah hal yang membuat pihak perbankan menolak pengajuan kredit nasabah?
4. berapa lama jangka waktu kredit UMKM?
5. berapakah jumlah kredit yang bisa diajukan dalam kredit UMKM?
6. apakah yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam memperkenalkan produk perbankan dengan nasabah?
7. apakah pihak perbankan bersedia membantu masyarakat dalam melengkapi administrasi?
- 8, pelayanan seperti apa yang diberikan oleh pihak perbankan dalam membantu nasabah untuk penyaluran kredit UMKM?
9. kesimpulannya, bagaimana praktek UU No.20 Tahun 2008 diterapkan disini?

- Nasabah

1. darimana bapak mendapat informasi tentang kredit UMKM?
2. apa yang menjadi kendala bapak dalam mengajukan kredit UMKM?
3. apa yang menjadi kendala nasabah dalam pembayaran angsuran kredit?

4. berapa jumlah pengajuan kredit UMKM yang masuk di Bank Sumsel Babel periode 2014-2016?

5. berapa jumlah kredit yang disetujui? Jelaskan

6. berapa jumlah kredit yang ditolak? Jelaskan

7. berapa jumlah kredit yang dibantu? (sesuai dengan aturan)

8. apakah nasabah sudah patuh dan taat dengan UU no. 20 tahun 2008

b. Rutinitas dan fungsi

*Informasi

-implementor

1. bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat tentang kredit UMKM?

2. Kapan pihak perbankan memberikan informasi tentang kredit UMKM kepada masyarakat?

-nasabah

1. apakah bapak sudah tahu tentang kredit UMKM?

2. darimana bapak tahu informasi kredit UMKM?

3. apa tanggapan bapak mengenai program kredit UMKM ini?

*(SOP) dan tupoksi

- implementor

1. jelaskan prosedur dalam pelaksanaan penyaluran kredit UMKM?

2. bagian mana saja yang menangani penyaluran kredit termasuk kredit UMKM?

3. apa tupoksi dari bagian masing-masing?

4. apakah SOPnya sudah sesuai dengan aturan yang ada? (sudah baik atau tidak)

***Sarana dan prasarana**

apakah yang menjadi kendala dalam penyaluran kredit?

c. Dampak

1. apakah kredit UMKM berdampak kepada penghasilan perbankan?

2. bagaimana kinerja kredit pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk khususnya kredit UMKM?

- bagaimana kinerja penyaluran kredit secara umum di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk?

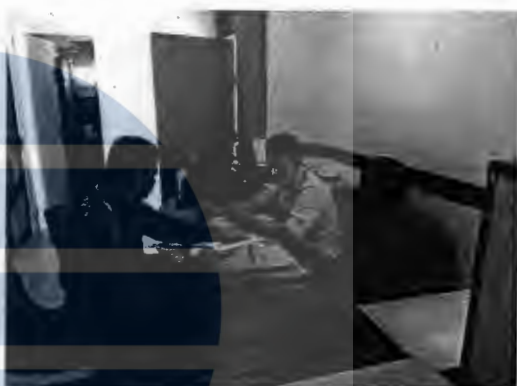
- bagaimana kinerja penyaluran kredit UMKM di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Bingin Teluk periode januari 2014 – maret 2016?

- berapa jumlah yang mengajukan kredit (dilihat dari tahun ke tahun)?

3. adakah nasabah kredit yang sudah lunas, kembali mengambil kredit?

4. apakah setelah mengambil kredit UMKM, usahanya tambah maju?

FOTO PENELITIAN



**JUMLAH NASABAH PERMOHONAN KREDIT UMKM YANG DISETUJUI
PERIODE JANUARI 2014 - APRIL 2016**

NO	REKENING	NAMA	BUNGA	TGL DIBERI	TGL JT	PLAFOND	BAKI DEBET
1	1852500196	MARSO SUWITO	15	22/01/2014	22/01/2017	Rp100,000,000	Rp32,396,122
2	1852500198	MUSTOFA HAKIM	15	20/03/2014	20/03/2019	Rp100,000,000	Rp66,390,371
3	1852500199	HUSNA LATIFAH	15	20/03/2014	20/03/2017	Rp100,000,000	Rp35,419,915
4	1852500200	APRIANSYAH	15	20/03/2014	20/03/2019	Rp70,000,000	Rp46,473,193
5	1855500128	MESI HANDAYANI	14	12/08/2014	12/08/2017	Rp75,000,000	Rp32,394,992
6	1855500132	JUMIRAH.	14	18/08/2014	18/08/2017	Rp100,000,000	Rp44,444,440
7	1855500133	SUMALI	14	18/08/2014	18/08/2017	Rp150,000,000	Rp66,666,660
8	1855500136	EKA PUSPITA SARI	14	18/09/2014	18/09/2017	Rp80,000,000	Rp47,351,887
9	1855500138	HABI YANTO AZ.	14	24/09/2014	24/09/2019	Rp800,000,000	Rp555,581,840
10	1855300011	PONO.	7.67	18/11/2014	18/11/2017	Rp50,000,000	Rp25,154,563
11	1855300014	CIK DIN.	7.67	18/11/2014	18/11/2017	Rp50,000,000	Rp25,154,563
12	1855300010	NAZIRIN YUSUF	7.67	19/11/2014	19/11/2017	Rp75,000,000	Rp37,731,886
13	1855300012	CIPTO PAWIRO	7.67	19/11/2014	19/11/2017	Rp115,000,000	Rp57,855,586
14	1855720001	UMMUL KHOIRIAH	14.53	29/04/2015	29/04/1930	Rp180,000,000	Rp174,686,967
15	1855720002	HELAWATI	14.53	29/04/2015	29/04/1930	Rp210,000,000	Rp203,801,460
16	1855720004	EKA SARIWATI	14.53	30/04/2015	30/04/1930	Rp270,000,000	Rp262,138,992
17	1855720005	JULIANA SARI	15.09	30/04/2015	30/04/2027	Rp245,000,000	Rp235,007,209
18	1855720006	EDI HARTONO	15.19	21/05/2015	21/11/2026	Rp182,000,000	Rp174,555,690
19	1855300016	CANDRA ELFIZON	13.75	14/08/2015	14/08/2018	Rp150,000,000	Rp112,499,997
20	1855300017	M.NASIR.	13.75	14/08/2015	14/08/2018	Rp85,000,000	Rp63,750,001

NO	REKENING	NAMA	BUNGA	TGL DIBERI	TGL JT	PLAFOND	BAKI DEBET
21	1855300018	AHMAD MIRZA FAKHRI	13.75	14/08/2015	14/08/2018	Rp300,000,000	Rp225,000,003
22	1855300020	EDI HARTO	13.75	14/08/2015	14/08/2018	Rp220,000,000	Rp171,111,112
23	1855300021	AHMAD FARIADI	13.75	14/08/2015	14/08/2018	Rp75,000,000	Rp58,333,336
24	1855302515	GUNARDI	13.75	29/09/2015	29/09/2018	Rp80,000,000	Rp63,907,975
25	1855302615	M.SAI	13.75	29/09/2015	29/09/2018	Rp80,000,000	Rp63,907,975
26	1855303015	DAVID CAHYONO	13.75	26/11/2015	26/11/2018	Rp450,000,000	Rp387,500,000
27	1855300216	SYAHRIL JAMAN	13.75	23/03/2016	23/03/2019	Rp150,000,000	Rp144,409,113
28	1855300316	USWADI,SAINI	13.75	23/03/2016	23/03/2019	Rp80,000,000	Rp77,018,187
29	1855300616	ILİYATI	13.75	15/04/2016	15/04/2019	Rp200,000,000	Rp200,000,000
30	1855300416	KRIS MURNI WANTI	13.75	19/04/2016	19/04/2019	Rp240,000,000	Rp240,000,000
31	1855700116	RISTIN NOLIA	14.59	20/04/2016	20/04/1931	Rp190,000,000	Rp190,000,000
32	1855700216	ENI ROSMALINA	14.96	29/04/2016	29/04/2029	Rp300,000,000	Rp300,000,000
33	1852500186	LILIS SURYANI.	15	3/01/14	3/01/17	Rp200,000,000	Rp64,792,664
34	1852500195	MANAN B.	15	3/02/14	3/02/17	Rp200,000,000	Rp70,840,250
35	1852500197	HENDRO RATMOKO	15	4/03/14	4/03/17	Rp200,000,000	Rp70,840,250
36	1855500123	YUYUN.	14	4/06/14	4/06/19	Rp75,000,000	Rp53,319,092
37	1855500124	SARMIN.	14	4/06/14	4/06/19	Rp70,000,000	Rp49,764,424
38	1855500125	SUYANTO	14	4/06/14	4/06/17	Rp49,000,000	Rp21,515,552
39	1855500126	SURATMI	14	4/06/14	4/06/18	Rp80,000,000	Rp48,784,424
40	1855500201	WAHYONO	13	4/06/14	4/06/17	Rp60,000,000	Rp26,129,886
41	1855720003	SARINA DEWI HARTI	14.53	5/05/15	5/05/30	Rp222,000,000	Rp215,447,260
42	1855500127	NURSUCI	14	5/08/14	5/08/19	Rp210,000,000	Rp140,000,000

NO	REKENING	NAMA	BUNGA	TGL DIBERI	TGL JT	PLAFOND	BAKI DEBET
43	1855500129	AGUS SUPRAPTO	14	5/08/14	5/08/19	Rp70,000,000	Rp46,666,660
44	1855500131	SULISTIYAWATI	14	5/08/14	5/08/18	Rp240,000,000	Rp140,000,000
45	1855500130	KUSIRAN	14	5/08/14	5/08/17	Rp75,000,000	Rp44,872,003
46	1855302715	RIDUAN.	13.75	7/10/15	7/10/18	Rp35,000,000	Rp28,194,446
47	1855302815	MATTURIDI	13.75	7/10/15	7/10/18	Rp75,000,000	Rp60,416,669
48	1855300013	BUDIONO .	7.67	8/12/14	8/12/17	Rp50,000,000	Rp26,322,648

